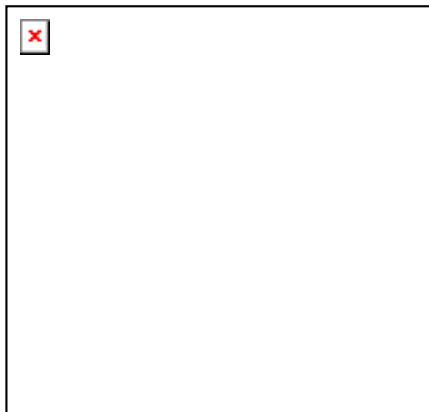


**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG KHULU'
SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP ISTRI SAFIHAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

SYAIFULLAH
2101029

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

MOTTO

*Artinya : “Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya (tulang rusuk) Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisa : 1)*¹

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang : CV. Toha Putra, 1995, hal. 114

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tua tercinta, kakak-kakakku, adikku, anak-anak didikku, sahabatku yang paling sabar dalam mengarungi gelombang kehidupan Nasta'in, Musta'in, Muahmmad Akrom (2001), dan ucapakan terima kasih kepada semua teman-temanku yang lulus tahun ini, tanpa dukungan moril dan doa dari kalian rasanya tidak mungkin saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 30 Juli 2008

Deklarator

Syaifullah

ABSTRAKS

Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah balig dan berakal sehat, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) manakala diizinkan oleh walinya, imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* membolehkan *ruju'* bagi suami yang telah menjatuhkan *talaq* secara *khulu'* kepada istri yang dalam keadaan *safihah*, dan beliau berpendapat orang yang safih masih dalam kekuasaan *currator*.

Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut tentang bagaimana keabsahan *ruju'* suami kepada istri *safihah* yang *dikhulu'*, dengan menggunakan harta, dan apakah konsep *khulu'* yang didefinisikan beliau sesuai dengan pengertian *khulu'* itu sendiri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan pengumpulan data. Yang datanya diambil melalui telaah skripsi dan kitab-kitab fiqih, ushul fiqih, hadis dan tafsir, kemudian dianalisis dengan pendekatan ushul fiqih dan metode *kualitatif diskriptif analisis*.

Istinbat hukum yang beliau gunakan dalam permasalahan *mahjur* mengambil dasar Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. an-Nisa ayat 6, beliau menetapkan kondisi kanak-kanak, orang lemah akalnya, anak yatim dan safih ditaruh di bawah kekuasaan wali.

Pendapat imam Syafi'i tersebut bila diterapkan di Indonesia, penulis rasa kurang tepat, mengingat kondisi sosial masyarakat muslim Indonesia berbeda dengan kondisi di era beliau, dalam KHI pada pasal 161 diatur perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat *diruju'* kembali, akan tetapi imam Syafi'i memperbolehkan suami untuk *meruju'* bekas istrinya.

Dan dalam UU. No.1 tahun 1974 pada ayat 1 yang menyebutkan " Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ", dalam perwalian ini juga terdapat pada Inpres No. 1 Tahun 1991 pada pasal 107 ayat 1 menyebutkan : " Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ".

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt. pemilik semua kemanfaatan di dunia dan di akhirat, yang dengan rahmat, hidayat dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam sejahtera dan keselamatan semoga tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. Dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. penulis merasa mendapatkan makna hidup hakiki di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua ini terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis tidak akan pernah lupa untuk menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA. Selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Muhyidin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, beserta stafnya, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nur Huda M. Ag, dan Bapak Prof. Ahmad Rofiq M. Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

Harapan dan doa penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasan dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah swt. serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang di sebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Semarang, 29 Juli 2008

Penulis,

Syaifullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
DAFTAR ISI	vii
 BAB I: PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Masalah	1-10
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10-11
D. Telaah Pustaka	11-15
E. Metodolog	15-17
F. Sistematika Pembahasan	17-18
 BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN MAHJUR	
'ALAIH	18-44
A. Khulu' Dalam Perspektif Islam	18-35
1. Definisi Khulu'	18-21
2. Dasar Hukum Khulu'	21-23
3. Syarat dan Rukun Khulu'	23-32
4. Alasan dan Pendapat Ulama Tentang Khulu'	32-35
B. Mahjur 'Alaih Dalam Perspektif Ulama	35-44
1. Definisi Mahjur 'Alaih.....	35-39
2. Sifat-Sifat Yang Termasuk Mahjur 'Alaih	39-44
 BAB III: ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I DAN PENDAPAT IMAM	
SYAFI 'I TERHADAP KHULU' ISTRI SAFIHAH	44-51
A. Biografi Imam Syafi'i... ..	44-45

1. Latar Belakang Imam Syafi'i.....	45-45
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	45
3. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	45-46
4. Situasi Politik di Era Kehidupan Imam Syafi'i.....	46-47
5. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	47-50
6. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	50-51
B. Istinbat Hukum Imam Syafi'i.....	51-58
C. Pendapat Imam Syafi'i Terhadap Khulu' Istri Safihah.....	59-60

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TERHADAP SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP KHULU'

ISTRI SAFIHAH	61-88
A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Ulama Lain	61-76
B. Analisis istinbat Hukum Imam Syafi'i	77-88

BAB V: PENUTUP	89-91
A. Kesimpulan	89-90
B. Saran	90-91
C. Penutup.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah pada hamba-Nya, berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (pria dan wanita) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini Allah berfirman :

Artinya : "Dan segala sesuatu itu kami (Allah) jadikan berpasangan, agar kamu semua berfikir". (Az-Zariyah : 49)

Perkawinan bagi manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing dari pasangan mereka (laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas r.a.

Artinya : "Ada tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi saw, seraya berkata tentang ibadah beliau (sehari-hari), ketika mereka telah mendapat jawaban (keterangan) mereka merasa dirinya kecil, lalu mereka berkata : "seberapaakah kita ini (keadaan kita ini) kalau dibandingkan dengan (kehidupan) Nabi saw, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang ?. Maka orang pertama (dari mereka itu) menjawab : "aku akan melakukan salat malam (tahajud) selama-lamanya (terus menerus)". Dan orang kedua menyahut : "kalau aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka". Maka orang ketiga menyahut : "Aku akan menjahui perempuan dan selamanya tidak akan menikah". Kemudian Nabi saw datang lalu bersabda : kamukah tadi yang berkata begini dan begitu ?. Demi Allah bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku toh masih tetap melakukan puasa dan berbuka, salat, tidur dan kawin.

*Barang siapa yang membenci tuntunanku, maka berarti ia bukan umatku”.*¹

Dari hadis di atas jelas bahwa menikah merupakan anjuran Nabi saw. Keutuhan dan keharmonisan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga akhir hayat, agar suami dan istri bersama-sama mewujudkan kehidupan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih dan dapat memelihara anaknya hingga tumbuh menjadi generasi yang saleh. Oleh karena itu dikatakan ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang suci dan kuat. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dengan nama “*misaqan galidan*”,² sebagaimana tertera dalam Firman Allah :

Artinya : ”Dan mereka (istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Pelaksanaan akad nikah cukup sederhana, hanya melalui suatu ucapan pendek sebagai transaksi antara calon suami dan wali dengan upacara yang melibatkan tidak banyak orang, dengan persyaratan sederhana pula, namun konsekuensi berikutnya sangat serius dan berat, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hidup. Jadi bukan hanya sekedar penyaluran libido sex, atau bahkan pembentukan keluarga saja, tapi menyangkut seluruh kehidupan dan segala kebutuhannya, bukan hanya di dunia tetapi juga di kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah swt. menyebut akad pernikahan sebagai *misaqan galidan* (janji berat).³

¹Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet. I, hlm. 904

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Tholib, Jilid VIII, Bandung : Pustaka Rizki Putra, Cet. 20, 2006, hlm. 250

³Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Diktat Kuliah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2002, hlm. 7

Bahwa janji ini janji yang sesuai dengan pelaksanaan kehidupan keduanya yang merupakan keadaan fitrah yang *salimah* sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir".

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan, yang sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, menjadi rumah tangganya sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen, agar dalam perlindungan rumah tangganya suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar dapat menciptakan iklim rumah tangganya yang memungkinkan terwujud dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik- baiknya. Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terbentuknya tali pengikat perkawinan itu dan tidak sepatasnya mereka merusak dan memutuskan tali perkawinan meskipun oleh agama sendiri suami diberi hak untuk mengajukan *talaq* dan istri berhak mengajukan *khulu'*.

Dalam KHI pada pasal 124 disebutkan *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 166.⁴ *Khulu'* dalam al-Qur'an dihalalkan oleh Allah tertera dalam QS. Al-Baqarah Ayat 229 :

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah

⁴Abdur Rahman, *KHI di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, Cet.I, hlm. 140

kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.” (QS.Al-Baqarah : 229)

Di dalam hadis yang dikemukakan oleh As-Sa’ani, bahwa istri Sabit bin Qais bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut :

Artinya : ”Ya Rasulullah terhadap Sabit bin Qais saya tidak mencela tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya benci kekufurannya (terhadap suami) dalam Islam”. Terhadap pengaduan ini Rasulullah saw. bersabda kepadanya: ”Bersediakah engkau mengembalikan kepadanya (Sabit) kebunnya ?”, Jamilah menjawab : “Ya (bersedia)”. Kemudian Rasulullah saw. memanggil Sabit lalu beliau bersabda kepadanya “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talaq“.⁵

Dalam KHI pada pasal 116 *khulu’* dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talaq*.

⁵Zakiah Daradjat, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984/1985, hlm. 251-253

h. Peralihan agama atau murtad

Talaq menurut kesepakatan ulama ada 2, yaitu: *bain dan raj'i*.⁶ Kedua jenis *talaq* tersebut masing-masing mempunyai spesifikasi yaitu bahwa *talaq* yang pertama (*raj'i*) ialah *talaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, dimana suami berhak untuk meruju'nya kembali selama istri dalam masa *'iddah*. *Talaq* yang kedua (*talaq bain*), *talaq bain* dibagi dua yaitu *talaq bain sugra* dan *talaq bain kubra*. *Talaq bain kubra* terjadi karena *li'an* dan *talaq* yang dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya kepada istri, *talaq* karena *li'an* suami tidak dapat kembali kepada mantan istri selamanya. Sedangkan *talaq* yang dijatuhkan kepada istri yang ketiga kalinya suami masih bisa kembali kepada bekas istrinya, dengan ketentuan bekas istrinya yang *ditalaq* ketiga kalinya itu telah menikah dengan lelaki lain dan *didukhul* lalu diceraikan dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari mantan suami yang telah *mentalaq* ketiga kalinya kepada bekas istrinya itu, baru dari pihak mantan suami yang telah *mentalaq* ketiga kalinya itu diperkenankan untuk kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah baru. Adapun *talaq bain sugra* ialah *talaq* yang tidak boleh *ruju'* akan tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa *'iddah*, *talaq* ini terjadi karena *khulu'*. Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya. Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai *talaq bain* bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwad* yang telah diterima kepadanya itu namun suami tetap tidak berhak meruju' bekas istrinya,

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*, Daar Ihya al-Arabiyy, Indonesia, Juz II, hlm. 45

dan meskipun istri rela menerimanya kembali *'iwad* tersebut. Mantan suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah baru.⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah balig dan berakal sehat, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) manakala diizinkan oleh walinya.

Ulama Hanafiyah berpendapat :

8

Artinya : "Adapun wanita yang safihah ialah wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar'i, maka ketika wanita safihah tersebut mengkhulu' suaminya dengan harta jatuhlah talaq dan tidak wajib harta atasnya. Kemudian bila menggunakan lafal khulu' dan sepadannya dari lafal sindiran khulu' maka terjadi bain' dan bila dengan lafal talaq maka terjadi ruju'".

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat :

Artinya : "Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak pada wanita yang bodoh (safihah) dan tidak pada budak wanita melakukan khulu' pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang cenderung dengan sifat ini, bila khulu' wanita yang mempunyai sifat tersebut terhadap suami dengan harta dan diterima maka tidak sah khulu' dan wajib pada suami menolak pemberian harta tersebut, kecuali ketika diizinkan oleh wali atau majikan dalam khulu'. Sesungguhnya sah khulu' dan wajib memberikan tebusan, adapun wanita safihah tidak ada wali baginya".

Ulama Hanabilah berpendapat :

9

Artinya : "Disyaratkan orang yang wajib atasnya 'iwad adapun orang tersebut ahli dalam menasarufkan harta, maka tidak sah khulu' dengan 'iwad dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita yang dikekang atasnya sebab bodoh (safihah), walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta khulu' merupakan harta yang didermakan (tabaru') dan tidak perlu izinkan oleh walinya dalam mendermakannya".

⁷Zakiah Daradjat, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 255

⁸Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah*, Daar al-Kutub al-

'Alamiyah, Beirut Lebanon, hlm. 353

⁹*ibid*, hlm. 355

10 Imam Syafi'i berpendapat dalam *al-Umm* :

Artinya : “ Apabila seorang suami mengkhulu’ istri yang mahjur ’alaih (terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak batal, baginya (suami) berhak ruju’, meskipun talaq yang dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain dan baginya ruju’ “.

Secara hukum, *khulu’* merupakan *talaq bain sugra* yang konsekuensinya pihak suami tidak berhak meruju’ bekas istrinya lagi, dalam KHI pada pasal 161 diatur perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat diruju’ kembali, akan tetapi imam Syafi'i memperbolehkan suami untuk meruju’ bekas istrinya jika istrinya dalam kondisi *mahjur ’alaih*. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dipakai oleh Syafi'i sehingga beliau berpendapat seperti itu.

Berpijak dari pemikiran di atas, dan belum adanya skripsi yang membahas secara komprehensif mengenai *khulu’ safihah*, maka penulis tergerak melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “ Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu’ Suami Yang Memiliki Hak Ruju’ Terhadap Istri Yang Safihah ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pendapat imam Syafi'i dan ulama lain tentang *khulu’* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *mahjur* sebab *safihah*?
2. Bagaimana metode istinbat hukum imam Syafi'i ?

¹⁰Imam Syafi'i, *al-Umm*, Daar al-Fikr, hlm.53

3. Apakah pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *safihah* sesuai dengan keadaan masyarakat dan perundang-undangan Islam di Indonesia ?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i dan ulama lain tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *mahjur* sebab wanita *safihah*.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *safihah* disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan perundang-undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai *khulu'* terhadap wanita *safihah*. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literatur, baik berupa kitab-kitab fiqh maupun skripsi. Beberapa kitab fiqh yang membahas permasalahan *khulu'* memiliki sifat *safih* yaitu :

1. *Kitab Fiqih 'ala Mazahibul 'Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Juzairi.

Dalam kitab fiqh tersebut menguraikan tentang syarat dan rukun *khulu'*.

Pada syarat yang mewajibkan penggunaan *'iwad* oleh orang yang *mukallaf* dan *rasyid*, dalam kitab tersebut ditampilkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tentang keabsahan *khulu'* yang dilakukan *safih*.

2. *Fathul Wahhab* karangan Abi Yahya Zakariyya al-Ansari. Dalam kitab tersebut diuraikan tentang keabsahan *khulu' mahjurah* sebab *Safihah* jatuh *talaq raj'i* jika mendapat izin dari walinya. Akan tetapi *'iwadnya* tidak sah.
3. *Syarah al-'Alamah ibnu Qasim al-Gaziy* karangan Ibrahim al-Baijuri. Dalam kitabnya menjelaskan *khulu' mahjurah* yang *muflis* sah dengan *'iwad* yang menjadi tanggungannya, dan jatuh *talaq bain*. Walaupun dengan harta yang disita. Sedangkan *khulu' mahjurah* sebab *safihah* jatuh *talaq raj'i*, dan hartanya tidak sah meskipun dengan mendapat izin dari walinya, karena dia tidak termasuk orang yang memiliki kemampuan dalam menasarufkan harta. Adapun jika dikhawatirkan hartanya dikuasai suami maka diperbolehkan menggunakan hartanya ketika terjadi *khulu'*.
4. *al-Hawil al-Kabir fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i* karangan Abi al-Hasan 'Ali, yang dalam kitab tersebut terdapat pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang *hajar* disertai dengan dalil yang bersumber dari *nas* yang dikomentari oleh al-Mawardi.
5. *al-Muhazab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i* karangan Abi Ishaq Ibrahim, yang memaparkan mengenai *khulu'* bagi *mahjur 'alaih* sebab *safih*, budak dan kanak-kanak

Adapun beberapa skripsi yang dapat di jadikan referensi :

1. Skripsi Nurul Fuadah (2005) dengan judul ” Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih ”. Imam Malik mengatakan bahwa orang yang lemah akal, *safih*, bahkan orang gila terkadang sadar, mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat, dan implikasinya membolehkan wasiat orang *safih* menyebabkan bercerai berai urusannya dan menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan,

tentang tindakannya menyebabkan hukum itu lemah karena tidak bisa membedakan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam kasus ini Malik mendasarkan pendapatnya pada *qaul as-shahabi* yaitu Umar bin Khattab tentang kebolehan wasiat anak kecil, dan Malik menyamakan dengan orang *safih* itu tidak terdapat landasan normatifnya baik dari al-Qur'an maupun hadis, sebab para sahabat itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang difahami dari Nabi, dalam penggunaan *qaul sahabat* dengan dalil syari'i, meskipun Malik mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan *hadis marfu'*, menurut penulis alasan Malik membolehkan wasiat orang *safih* adalah tidak rajih (tidak kuat) untuk dijadikan hukum. Sebab qaul sahabat itu tidak sekuat *nas*

2. Skripsi M. Nur Kholis (2004) dengan judul " Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kedewasaan Seseorang Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Hukum ". Abu Hanifah menetapkan seseorang dikatakan *balig* apabila ia sudah mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi wanita, pada umur tersebut perkembangan kemampuan akal seseorang sudah dianggap cukup mendalam dan dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk serta telah dapat mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang telah ia lakukan.
3. Skripsi Nastangin (1991) dengan judul " Kewenangan Seorang Wali Terhadap Diri Anak Dan Harta Kekayaannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat ". Adapun kewenangan wali terhadap diri anak baik dalam hukum perdata positif maupun dalam hukum Islam, orang yang memegang kekuasaan orang tua atau orang yang menjadi wali terhadap diri

anak maupun terhadap hartanya, dalam pelaksanaannya ia mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tadi semata-mata adalah ditujukan untuk kemaslahatan diri si anak dan hartanya. Menurut hukum perdata positif mengenai kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, kekuasaan itu berlaku juga dalam segala perbuatan hukum si anak baik dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan akhir batas kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak kecil yang di bawah kekuasaannya pada dasarnya adalah sama antara hukum Islam dengan hukum perdata barat yaitu sampai anak itu *balig* dan *rasyid*, hanya saja dalam batas penentuan umur anak yang belum dewasa berbeda di antara keduanya dalam hukum perdata barat (BW).

4. Skripsi Hikmawati (2006) dengan judul " Studi Pendapat Imam Malik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul ". Menurut Imam Malik, seorang suami yang menceraikan istrinya *qabla dukhul* maka kewajiban suami memberi *mahar*, hal itu tidak tergantung dari pihak mana perceraian itu terjadi. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bila membedakan antara perpisahan yang disebabkan oleh suami maka *maharnya* tidak gugur, namun apabila perpisahan disebabkan dari pihak istri sebelum atau sesudah terjadi *dukhul* maka gugur seluruh *mahar*.
5. Skripsi Wiwik Rochayati (1998) dengan judul " Tinjauan Tentang Pembatasan Usia Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Pendapat Para Fuqaha ". Para *fuqaha* telah sepakat bahwa *balig* bagi seseorang itu dengan kematangan seks, bagi laki-laki manakala telah

bermimpi dan bagi wanita telah menstruasi, namun masing-masing imam mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan umur minimal bagi seorang untuk mendapatkan tanda-tanda kebaligan itu, imam Syafi'i dan Hambali menentukan 15 tahun bagi pria dan wanita, imam Maliki menentukan usia 17 tahun bagi pria dan wanita, sedangkan imam Hanafi menentukan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi wanita.

Dari telaah skripsi di atas pada dasarnya hanya membahas seputar masalah kedewasaan seseorang dilihat dari segi umur dan biologis, status mahar bila terjadi perceraian, dan wasiat yang dilakukan seseorang yang *mahjur* sebab gila, dan *safih*. Di sini penulis mengangkat permasalahan yang belum dibahas oleh peneliti lain yaitu dalam hal *khulu'* yang terjadi terhadap wanita *safihah*. Dari pendapat Syafi'i memperbolehkan *khulu'* suami terhadap istri yang *safihah* jatuh *talaq raj'i.*, dalam KHI pada pasal 161 disebutkan ” Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talaq dan tidak dapat diruju”. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk hukum hasil dari para pendapat imam mazhab yang telah dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar ini pendapat imam Syafi'i perlu dianalisis secara mendalam. Dengan argumen tersebut penulis mengangkat permasalahan *mahjur 'alaih* yang dalam kondisi *safih* yang sepengetahuan penulis belum pernah dibahas, yaitu masalah *khulu'* terhadap wanita *safihah*.

E. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode *library research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹¹ Adapun sumber data primer ini adalah kitab *al-Umm*.
- b. sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹² Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 1. *Musnad* kitab karangan Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang dihimpun dari kitab *al-Umm*, di dalam kitab tersebut dijelaskan keadaan setiap sanad hadis.
 2. *Ma'rifatu as-Sunan wal al-Asar* kitab karangan Abi Bakar Muhammad bin al-Husain, suatu kitab fiqh yang menguraikan produk fiqh yang memuat pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang permasalahan seputar fiqh disertai dengan ayat-ayat al-qur'an hadis Nabi saw. dan asar sahabat .
 3. *Ar-Risalah*, suatu kitab yang khusus membahas tentang ushul fiqh dan merupakan kitab pertama yang ditulis imam Syafi'i ketika berada di Makkah, di dalam kitab tersebut beliau menguraikan tentang tata cara beristimbat hukum.

2. Analisis Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat *kualitatif diskriptif analisis* yaitu suatu metode menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis,

¹¹Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.3, 1995, hlm. 132

¹²Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.VIII, 2003, hlm. 126

luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan,¹³ metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat imam Syafi'i terhadap *khulu'* wanita *safihah*.

Selain metode di atas penulis juga menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mengetahui mengapa seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan kemudian mengungkapkan maksud apa yang terkandung di dalam penerapan masalah tersebut.¹⁴ Kemudian guna memecahkan masalah penelitian, penulis menggunakan pola pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual yuridis, Pendekatan ini untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i dalam *al-Umm* tentang konsep *khulu'* yang terjadi pada istri *mahjur 'alaih*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN MAHJUR 'ALAIH

Pada bab II ini menguraikan pengertian *khulu'* dalam perspektif Islam yang meliputi definisi *khulu'*, dasar-dasar *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*, alasan *khulu'* dan pendapat ulama tentang *khulu'* dan

¹³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University, Cet-9, 2000, hlm.63

¹⁴Amin Syukur dkk, *Metode Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, hlm. 81

menguraikan *mahjur 'alaih* dalam perspektif para ulama yang meliputi pengertian *mahjur 'alaih* dan termasuk sifat-sifat yang termasuk *mahjur 'alaih*.

BAB III. ISTINBAT HUKUM DAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I TERHADAP KHULU' WANITA SAFIHAH

Pada bab III ini mengungkap biografi imam Syafi'i mulai latar belakang, pendidikan, guru-guru beliau, situasi politik, karya-karya yang beliau hasilkan dan murid beliau dan memaparkan istinbat hukum yang beliau gunakan dalam menetapkan suatu hukum pada masalah tertentu, dan dilanjutkan dengan pendapat beliau tentang *khulu' safihah*

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ULAMA LAIN TERHADAP SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP KHULU' ISTRI SAFIHAH

Pada bab IV ini penulis menampilkan pendapat imam Syafi'i terhadap *khulu' istri yang safihah* beserta ulama yang mendukung pendapat imam Syafi'i dan pendapat ulama lain baik itu ulama klasik ataupun ulama kontemporer, kemudian penulis akan menganalisis alasan yang imam Syafi'i sajikan, dilanjutkan dengan menganalisis terhadap istinbat hukum imam Syafi'i yang digunakan terhadap pendapatnya

BAB V. PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran serta penutup.

BAB I PENDAHULUAN

G. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunatullah pada hamba-Nya, berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (pria dan wanita) Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini Allah berfirman :

Artinya : "Dan segala sesuatu itu kami (Allah) jadikan berpasangan, agar kamu semua berfikir". (Az-Zariyah : 49)

Perkawinan bagi manusia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan, beranak, melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing dari pasangan mereka (laki-laki dan perempuan) sudah siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Anas r.a.

Artinya : "Ada tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi saw, seraya berkata tentang ibadah beliau (sehari-hari), ketika mereka telah mendapat jawaban (keterangan) mereka merasa dirinya kecil, lalu mereka berkata : "seberapakah kita ini (keadaan kita ini) kalau dibandingkan dengan (kehidupan) Nabi saw, padahal beliau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang ?. Maka orang pertama (dari mereka itu) menjawab : "aku akan melakukan salat malam (tahajud) selama-lamanya (terus menerus)". Dan orang kedua menyahut : "kalau aku akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka". Maka orang ketiga menyahut : "Aku akan menjahui perempuan dan selamanya tidak akan menikah". Kemudian Nabi saw datang lalu bersabda : kamukah tadi yang berkata begini dan begitu ?. Demi Allah bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku toh masih tetap melakukan puasa dan berbuka, salat, tidur dan kawin. Barang siapa yang membenci tuntunanku, maka berarti ia bukan umatku".¹⁵

Dari hadis di atas jelas bahwa menikah merupakan anjuran Nabi saw.

Keutuhan dan keharmonisan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat

¹⁵Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Sahih al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta, Cet. I, hlm.

diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya hingga akhir hayat, agar suami dan istri bersama-sama mewujudkan kehidupan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih dan dapat memelihara anaknya hingga tumbuh menjadi generasi yang saleh. Oleh karena itu dikatakan ikatan antara suami dan istri merupakan ikatan yang suci dan kuat. Allah sendiri menamakan ikatan perjanjian antara suami dengan nama “*misaqan galidan*”,¹⁶ sebagaimana tertera dalam Firman Allah :

Artinya : "Dan mereka (istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".

Pelaksanaan akad nikah cukup sederhana, hanya melalui suatu ucapan pendek sebagai transaksi antara calon suami dan wali dengan upacara yang melibatkan tidak banyak orang, dengan persyaratan sederhana pula, namun konsekuensi berikutnya sangat serius dan berat, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hidup. Jadi bukan hanya sekedar penyaluran libido sex, atau bahkan pembentukan keluarga saja, tapi menyangkut seluruh kehidupan dan segala kebutuhannya, bukan hanya di dunia tetapi juga di kehidupan kelak di akhirat. Oleh karena itu Allah swt. menyebut akad pernikahan sebagai *misaqan galidan* (janji berat).¹⁷

Bahwa janji ini janji yang sesuai dengan pelaksanaan kehidupan keduanya yang merupakan keadaan fitrah yang *salimah* sebagaimana disyari'atkan oleh Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

Artinya : "Dan di antara kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir".

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. M. Tholib, Jilid VIII, Bandung : Pustaka Rizki Putra, Cet. 20, 2006, hlm. 250

¹⁷Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Diklat Kuliah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2002, hlm. 7

Stabilitas rumah tangga dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan, yang sangat diperhatikan oleh syari'at Islam. Akad perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup, menjadi rumah tangganya sebagai tempat berteduh yang nyaman dan permanen, agar dalam perlindungan rumah tangganya suami istri dapat menikmati kehidupannya serta agar dapat menciptakan iklim rumah tangganya yang memungkinkan terwujud dan terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terbentuknya tali pengikat perkawinan itu dan tidak sepatutnya mereka merusak dan memutuskan tali perkawinan meskipun oleh agama sendiri suami diberi hak untuk mengajukan *talaq* dan istri berhak mengajukan *khulu'*.

Dalam KHI pada pasal 124 disebutkan *khulu'* harus berdasarkan alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 166.¹⁸ *Khulu'* dalam al-Qur'an dihalalkan oleh Allah tertera dalam QS. Al-Baqarah Ayat 229 :

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya." (QS.Al-Baqarah : 229)

Di dalam hadis yang dikemukakan oleh As-Sa'ani, bahwa istri Sabit bin Qais bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw. mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut :

Artinya : "Ya Rasulullah terhadap Sabit bin Qais saya tidak mencela tentang budi pekerti dan agamanya, namun saya benci kekufurannya (terhadap suami) dalam Islam". Terhadap pengaduan ini Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Bersediakah engkau mengembalikan kepadanya

¹⁸Abdur Rahman, *KHI di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, Cet.I, hlm. 140

(Sabit) kebunnya ?”, Jamilah menjawab : “Ya (bersedia)”. Kemudian Rasulullah saw. memanggil Sabit lalu beliau bersabda kepadanya “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talaq”.¹⁹

Dalam KHI pada pasal 116 *khulu'* dapat terjadi karena alasan-alasan:

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- j. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- k. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- l. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- m. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- n. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- o. Suami melanggar *taklik talaq*.
- p. Peralihan agama atau murtad

Talaq menurut kesepakatan ulama ada 2, yaitu: *bain dan raj'i*.²⁰ Kedua jenis *talaq* tersebut masing-masing mempunyai spesifikasi yaitu bahwa *talaq* yang pertama (*raj'i*) ialah *talaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri, dimana suami berhak untuk meruju'nya kembali selama istri dalam masa *'iddah*. *Talaq* yang kedua (*talaq bain*), *talaq bain* dibagi dua yaitu *talaq bain sugra* dan *talaq bain kubra*. *Talaq bain*

¹⁹Zakiah Daradjat, *et al.*, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1984/1985, hlm. 251-253

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*, Daar Ihya al-Arabiy, Indonesia, Juz II, hlm. 45

kubra terjadi karena *li'an* dan *talaq* yang dijatuhkan oleh suami ketiga kalinya kepada istri, *talaq* karena *li'an* suami tidak dapat kembali kepada mantan istri selamanya. Sedangkan *talaq* yang dijatuhkan kepada istri yang ketiga kalinya suami masih bisa kembali kepada bekas istrinya, dengan ketentuan bekas istrinya yang *ditalaq* ketiga kalinya itu telah menikah dengan lelaki lain dan *didukhul* lalu diceraikan dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari mantan suami yang telah *mentalaq* ketiga kalinya kepada bekas istrinya itu, baru dari pihak mantan suami yang telah *mentalaq* ketiga kalinya itu diperkenankan untuk kembali kepada bekas istrinya dengan akad nikah baru. Adapun *talaq bain sugra* ialah *talaq* yang tidak boleh *ruju'* akan tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa *'iddah*, *talaq* ini terjadi karena *khulu'*. Tentang status perceraian karena *khulu'* dapat dikemukakan, bahwa bila seorang istri telah melakukan *khulu'* terhadap suaminya, maka dengan *khulu'* tersebut bekas istri menguasai dirinya sendiri secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali. Segala urusan berada di tangan bekas istri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suaminya guna melepaskan dirinya. Oleh karena itu status perceraian karena *khulu'* adalah sebagai *talaq bain* bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *'iwad* yang telah diterima kepadanya itu namun suami tetap tidak berhak *meruju'* bekas istrinya, dan meskipun istri rela menerimanya kembali *'iwad* tersebut. Mantan suami yang telah meng*khulu'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah baru.²¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah balig dan berakal sehat, dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) manakala diizinkan oleh walinya.

²¹Zakiah Daradjat, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 255

Ulama Hanafiyah berpendapat :

22

Artinya : "Adapun wanita yang safihah ialah wanita yang sampai menghamburkan, melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syar'i, maka ketika wanita safihah tersebut mengkhulu' suaminya dengan harta jatuhlah talaq dan tidak wajib harta atasnya. Kemudian bila menggunakan lafal khulu' dan sepadannya dari lafal sindiran khulu' maka terjadi bain' dan bila dengan lafal talaq maka terjadi ruju'".

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat :

Artinya : "Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak pada wanita yang bodoh (safihah) dan tidak pada budak wanita melakukan khulu' pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang cenderung dengan sifat ini, bila khulu' wanita yang mempunyai sifat tersebut terhadap suami dengan harta dan diterima maka tidak sah khulu' dan wajib pada suami menolak pemberian harta tersebut, kecuali ketika diizinkan oleh wali atau majikan dalam khulu'. Sesungguhnya sah khulu' dan wajib memberikan tebusan, adapun wanita safihah tidak ada wali baginya".

Ulama Hanabilah berpendapat :

23

Artinya : "Disyaratkan orang yang wajib atasnya 'iwad adapun orang tersebut ahli dalam menasarufkan harta, maka tidak sah khulu' dengan 'iwad dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita yang dikekang atasnya sebab bodoh (safihah), walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta khulu' merupakan harta yang didermakan (tabaru') dan tidak perlu izinkan oleh walinya dalam mendermakannya".

Imam Syafi'i berpendapat dalam *al-Umm* :

24

Artinya : "Apabila seorang suami mengkhulu' istri yang mahjur 'alaih (terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak batal, baginya (suami) berhak ruju', meskipun talaq yang dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain dan baginya ruju'".

Secara hukum, *khulu'* merupakan *talaq bain sugra* yang konsekuensinya

pihak suami tidak berhak meruju' bekas istrinya lagi, dalam KHI pada pasal 161

²²Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah*, Daar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut Lebanon, hlm. 353

²³*ibid*, hlm. 355

²⁴Imam Syafi'i, *al-Umm*, Daar al-Fikr, hlm.53

diatur perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat *diruju'* kembali, akan tetapi imam Syafi'i memperbolehkan suami untuk *meruju'* bekas istrinya jika istrinya dalam kondisi *mahjur 'alaih*. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa saja yang dipakai oleh Syafi'i sehingga beliau berpendapat seperti itu.

Berpijak dari pemikiran di atas, dan belum adanya skripsi yang membahas secara komprehensif mengenai *khulu' safihah*, maka penulis tergerak melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “ Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Khulu' Suami Yang Memiliki Hak Ruju' Terhadap Istri Yang Safihah ”.

H. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah :

4. Bagaimana pendapat imam Syafi'i dan ulama lain tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *mahjur* sebab *safihah*?
5. Bagaimana metode istinbat hukum imam Syafi'i ?
6. Apakah pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *safihah* sesuai dengan keadaan masyarakat dan perundang-undangan Islam di Indonesia ?

I. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i dan ulama lain tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *mahjur* sebab wanita *safihah*.
2. Untuk mengetahui metode istinbat hukum imam Syafi'i.

3. Untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap wanita *safihah* disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan perundang-undangan di Indonesia.

J. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai *khulu'* terhadap wanita *safihah*. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa literatur, baik berupa kitab-kitab fiqh maupun skripsi. Beberapa kitab fiqh yang membahas permasalahan *khulu'* memiliki sifat *safih* yaitu :

1. *Kitab Fiqih 'ala Mazahibul 'Arba'ah* karangan Abdur Rahman al-Juzairi.

Dalam kitab fiqh tersebut menguraikan tentang syarat dan rukun *khulu'*. Pada syarat yang mewajibkan penggunaan *'iwad* oleh orang yang *mukallaf* dan *rasyid*, dalam kitab tersebut ditampilkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tentang keabsahan *khulu'* yang dilakukan *safih*.

2. *Fathul Wahhab* karangan Abi Yahya Zakariyya al-Ansari. Dalam kitab tersebut diuraikan tentang keabsahan *khulu' mahjurah* sebab *Safihah* jatuh *talaq raj'i* jika mendapat izin dari walinya. Akan tetapi *'iwadnya* tidak sah.

3. *Syarah al-'Alamah ibnu Qasim al-Gaziy* karangan Ibrahim al-Baijuri.

Dalam kitabnya menjelaskan *khulu' mahjurah* yang *muflis* sah dengan *'iwad* yang menjadi tanggungannya, dan jatuh *talaq bain*. Walaupun dengan harta yang disita. Sedangkan *khulu' mahjurah* sebab *safihah* jatuh *talaq raj'i*, dan hartanya tidak sah meskipun dengan mendapat izin dari walinya, karena dia tidak termasuk orang yang memiliki kemampuan dalam menasarufkan harta. Adapun jika dikhawatirkan hartanya dikuasai suami maka diperbolehkan menggunakan hartanya ketika terjadi *khulu'*.

4. *al-Hawil al-Kabir fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i* karangan Abi al-Hasan 'Ali, yang dalam kitab tersebut terdapat pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang *hajar* disertai dengan dalil yang bersumber dari *nas* yang dikomentari oleh al-Mawardi.
5. *al-Muhazab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i* karangan Abi Ishaq Ibrahim, yang memaparkan mengenai *khulu'* bagi *mahjur 'alaih* sebab *safih*, budak dan kanak-kanak

Adapun beberapa skripsi yang dapat di jadikan referensi :

6. Skripsi Nurul Fuadah (2005) dengan judul ” Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Kebolehan Wasiat Orang Safih ”. Imam Malik mengatakan bahwa orang yang lemah akal, *safih*, bahkan orang gila terkadang sadar, mereka boleh berwasiat dengan syarat tahu dan mengerti tentang wasiat, dan implikasinya membolehkan wasiat orang *safih* menyebabkan bercerai berai urusannya dan menimbulkan suatu kerusakan dalam kehidupan, tentang tindakannya menyebabkan hukum itu lemah karena tidak bisa membedakan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam kasus ini Malik mendasarkan pendapatnya pada *qaul as-shahabi* yaitu Umar bin Khattab tentang kebolehan wasiat anak kecil, dan Malik menyamakan dengan orang *safih* itu tidak terdapat landasan normatifnya baik dari al-Qur'an maupun hadis, sebab para sahabat itu tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang difahami dari Nabi, dalam penggunaan *qaul sahabat* dengan dalil syari'i, meskipun Malik mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut harus tidak bertentangan dengan *hadis marfu'*, menurut penulis alasan Malik membolehkan wasiat

orang *safih* adalah tidak rajih (tidak kuat) untuk dijadikan hukum. Sebab qaul sahabat itu tidak sekuat *nas*

7. Skripsi M. Nur Kholis (2004) dengan judul ” Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kedewasaan Seseorang Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Hukum ”. Abu Hanifah menetapkan seseorang dikatakan *balig* apabila ia sudah mencapai umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi wanita, pada umur tersebut perkembangan kemampuan akal seseorang sudah dianggap cukup mendalam dan dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk serta telah dapat mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang telah ia lakukan.
8. Skripsi Nastangin (1991) dengan judul ” Kewenangan Seorang Wali Terhadap Diri Anak Dan Harta Kekayaannya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat ”. Adapun kewenangan wali terhadap diri anak baik dalam hukum perdata positif maupun dalam hukum Islam, orang yang memegang kekuasaan orang tua atau orang yang menjadi wali terhadap diri anak maupun terhadap hartanya, dalam pelaksanaannya ia mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tadi semata-mata adalah ditujukan untuk kemaslahatan diri si anak dan hartanya. Menurut hukum perdata positif mengenai kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin, kekuasaan itu berlaku juga dalam segala perbuatan hukum si anak baik dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan akhir batas kekuasaan orang tua atau perwalian terhadap anak kecil yang di bawah kekuasaannya pada dasarnya adalah sama antara hukum Islam dengan hukum perdata barat yaitu sampai anak itu *balig* dan *rasyid*, hanya saja dalam batas penentuan umur anak

yang belum dewasa berbeda di antara keduanya dalam hukum perdata barat (BW).

9. Skripsi Hikmawati (2006) dengan judul ” Studi Pendapat Imam Malik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul ”. Menurut Imam Malik, seorang suami yang menceraikan istrinya *qabla dukhul* maka kewajiban suami memberi *mahar*, hal itu tidak tergantung dari pihak mana perceraian itu terjadi. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi’i dan Hanafi berpendapat bila membedakan antara perpisahan yang disebabkan oleh suami maka *maharnya* tidak gugur, namun apabila perpisahan disebabkan dari pihak istri sebelum atau sesudah terjadi *dukhul* maka gugur seluruh *mahar*.
10. Skripsi Wiwik Rochayati (1998) dengan judul ” Tinjauan Tentang Pembatasan Usia Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Pendapat Para Fuqaha ”. Para *fuqaha* telah sepakat bahwa *balig* bagi seseorang itu dengan kematangan seks, bagi laki-laki manakala telah bermimpi dan bagi wanita telah menstruasi, namun masing-masing imam mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan umur minimal bagi seorang untuk mendapatkan tanda-tanda *kebaligan* itu, imam Syafi’i dan Hambali menentukan 15 tahun bagi pria dan wanita, imam Maliki menentukan usia 17 tahun bagi pria dan wanita, sedangkan imam Hanafi menentukan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi wanita.

Dari telaah skripsi di atas pada dasarnya hanya membahas seputar masalah kedewasaan seseorang dilihat dari segi umur dan biologis, status mahar bila terjadi perceraian, dan wasiat yang dilakukan seseorang yang *mahjur* sebab gila, dan *safih*. Di sini penulis mengangkat permasalahan yang belum dibahas oleh

peneliti lain yaitu dalam hal *khulu'* yang terjadi terhadap wanita *safihah*. Dari pendapat Syafi'i memperbolehkan *khulu'* suami terhadap istri yang *safihah* jatuh *talaq raj'i.*, dalam KHI pada pasal 161 disebutkan ” Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talaq dan tidak dapat diruju”’. Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu produk hukum hasil dari para pendapat imam mazhab yang telah dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar ini pendapat imam Syafi'i perlu dianalisis secara mendalam. Dengan argumen tersebut penulis mengangkat permasalahan *mahjur 'alaih* yang dalam kondisi *safih* yang sepengetahuan penulis belum pernah dibahas, yaitu masalah *khulu'* terhadap wanita *safihah*.

K. Metode Penelitian

3. Sumber Data

Karena penulisan skripsi ini menggunakan metode *library research*, maka diambil data dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁵ Adapun sumber data primer ini adalah kitab *al-Umm*.
- b. sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 1. *Musnad* kitab karangan Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang dihimpun dari kitab *al-Umm*, di dalam kitab tersebut dijelaskan keadaan setiap sanad hadis.

²⁵Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.3, 1995, hlm. 132

²⁶Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.VIII, 2003, hlm. 126

2. *Ma'rifatu as-Sunan wal al-Asar* kitab karangan Abi Bakar Muhammad bin al-Husain, suatu kitab fiqh yang menguraikan produk fiqh yang memuat pendapat-pendapat imam Syafi'i tentang permasalahan seputar fiqh disertai dengan ayat-ayat al-qur'an hadis Nabi saw. dan asar sahabat .
3. *Ar-Risalah*, suatu kitab yang khusus membahas tentang ushul fiqh dan merupakan kitab pertama yang ditulis imam Syafi'i ketika berada di Makkah, di dalam kitab tersebut beliau menguraikan tentang tata cara beristimbat hukum.

4. Analisis Data

Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat *kualitatif diskriptif analisis* yaitu suatu metode menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan,²⁷ metode ini digunakan untuk menganalisis pendapat imam Syafi'i terhadap *khulu' wanita safihah*.

Selain metode di atas penulis juga menggunakan pendekatan ushul fiqh, yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah ushul fiqh untuk mengetahui mengapa seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan kemudian mengungkapkan maksud apa yang terkandung di dalam penerapan masalah tersebut.²⁸ Kemudian guna memecahkan masalah penelitian, penulis menggunakan pola pendekatan yang dilakukan dengan

²⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University, Cet-9, 2000, hlm.63

²⁸Amin Syukur dkk, *Metode Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press, hlm. 81

menggunakan pendekatan tekstual yuridis, Pendekatan ini untuk mengetahui pendapat imam Syafi'i dalam *al-Umm* tentang konsep *khulu'* yang terjadi pada istri *mahjur 'alaih*.

L. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II. KETENTUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN MAHJUR 'ALAIH

Pada bab II ini menguraikan pengertian *khulu'* dalam perspektif Islam yang meliputi definisi *khulu'*, dasar-dasar *khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*, alasan *khulu'* dan pendapat ulama tentang *khulu'* dan menguraikan *mahjur 'alaih* dalam perspektif para ulama yang meliputi pengertian *mahjur 'alaih* dan termasuk sifat-sifat yang termasuk *mahjur 'alaih*.

BAB III. ISTINBAT HUKUM DAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I TERHADAP KHULU' WANITA SAFIAH

Pada bab III ini mengungkap biografi imam Syafi'i mulai latar belakang, pendidikan, guru-guru beliau, situasi politik, karya-karya yang beliau hasilkan dan murid beliau dan memaparkan istinbat hukum yang beliau gunakan dalam menetapkan suatu hukum pada masalah tertentu, dan dilanjutkan dengan pendapat beliau tentang *khulu' safiah*

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ULAMA LAIN TERHADAP SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP KHULU' ISTRI SAFIHAH

Pada bab IV ini penulis menampilkan pendapat imam Syafi'i terhadap *khulu'* istri yang *safihah* beserta ulama yang mendukung pendapat imam Syafi'i dan pendapat ulama lain baik itu ulama klasik ataupun ulama kontemporer, kemudian penulis akan menganalisis alasan yang imam Syafi'i sajikan, dilanjutkan dengan menganalisis terhadap istimbat hukum imam Syafi'i yang digunakan terhadap pendapatnya

BAB V. PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN MAHJUR 'ALAIH

A. Khulu' Dalam Perspektif Islam

1. Definisi Khulu'

Khulu' menurut etimologi berasal dari kata yang berarti
menanggalkan pakaian / melepaskan pakaian, sedangkan menurut terminologi
fiqih ialah tuntutan cerai yang diajukan istri dengan pembayaran ganti rugi
darinya, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti
rugi kepadanya¹. Menurut Zainuddin bin Abdil 'Aziz *khulu'* dari segi bahasa

*Artinya : "Khulu' dengan harakat dummah pada huruf kha dari lafal khulu'
dengan harakat fathah pada huruf 'ain berarti menanggalkan karena
sesungguhnya tiap-tiap dari suami istri pakaian bagi lainnya seperti
didalam ayat".*

2

*Artinya : "Secara syari'at perceraian dengan 'iwad pada suami dengan lafal
talaq atau khulu'".*

Sedangkan menurut Abi Ishaq Ibrahim dalam kitab *al-Muhazab*
berpendapat

3

*Artinya : "Asal khulu' dari menanggalkan kemeja dari badan dan dia
membuka kemeja dari badannya dan menghilangkannya karena
sesungguhnya khulu' ialah menghilangkan nikah sesudah
mewajibkannya dan demikian seorang wanita sebagai pakaian bagi
laki-laki dan laki-laki sebagai pakaian dari wanita, Allah ta'ala
berfirman : mereka (wanita) sebagai pakaian bagi kalian (laki-laki)
dan kalian (laki-laki) sebagai pakaian bagi mereka (wanita) (al-
Baqarah : 187), maka jika terjadi khulu' keduanya sungguh telah
membuka tiap-tiap satu dari kedua (suami dan istri) pada
pakaianya".*

Khulu' menurut Prof. DR. H. Mahmud Yunus, *khulu'* ialah perceraian
antara suami dan istri dengan membayar *'iwad* dari pihak istri, baik dengan

¹Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya : Terbit Terang, hlm.
353-354

²Zainuddin bin Abdil 'Aziz, *Fathul Mu'in*, hlm.111

³Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as- Syafi'i*, Beirut
Lebanon : Daar al Kutub al 'Alamiyyah, hlm. 489

ucapan *khulu'* maupun *talaq*.⁴ Sedangkan menurut KHI *khulu'* ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami.⁵

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *khulu'* itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Haris, tatkala istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya : "Aku tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan (*khulu'*) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya".⁶

2. Dasar Hukum Khulu'

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus digunakan. Islam membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci oleh Allah. Syafi'iyyah berpendapat : bahwa tidak beda antara bolehnya *khulu'* dengan mengembalikan semua maharnya / sebagiannya, atau dengan kata lainnya, baik jumlahnya kurang dari harga maharnya / lebih, tidak beda antara pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam *khulu'* berdasarkan keumuman firman Allah Q.S.

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya, Cet.10, 1983, hlm. 131

⁵Abdur Rahman, *op. cit.*, hlm.114

⁶Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *op. cit.*, hlm. 357

Al-Baqarah ayat 229, yang artinya : "Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami dan istri) tentang apa yang dijadikan tebusan". Jika kebencian terjadi pada pihak suami, maka di tangannya terletak *talaq* yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian pada pihak istri maka Islam juga membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan *khulu'* yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri, dasar hukum *khulu'* tertera di dalam *nas* yaitu :

a. Al-Qur'an

Berkaitan dengan *khulu'* Allah swt juga telah berfirman

Artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlan kamu melanggarnya, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya". (QS.Al-Baqarah : 229)⁷

b. Hadis Nabi saw.

Artinya : "Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Abbas ra, bahwa Sabit bin Qais menemui Nabi saw, dan berkata : "ya Rasullullah ! saya tidak menjelekan Sabit bin Qais dalam beberapa hal akhlaq dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam (apabila saya tetap menjadi istrinya)", Rasullullah saw, bersabda : "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Sabit bin Qais (sebagai mas kawin) ?, istri Sabit menjawab : "ya", Rasullullah saw bersabda kepada Sabit bin Qais : "terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu talaq".⁸

Prof. Dr. H. Mahmud Yunus memberikan komentar yang dimaksud dengan kekafiran dalam Islam ialah kekafiran nikmat, yakni karena ia sangat

hlm. 39 ⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005,

⁸Imam az-Zabidi, *op. cit.*, hlm. 928

benci kepada Sabit, ia tidak dapat berterima kasih kepadanya yang dinamai kafir nikmat. Dalam ayat dan hadis itu ditegaskan sebab-sebab boleh meminta khulu

- a. jika kedua suami-istri tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah, yaitu pergaulan secara ma'ruf.
- b. karena istri sangat membenci suaminya lantaran sebab-sebab yang tidak disukai, sehingga ia takut tidak akan dapat mematuhi suaminya.⁹

3. Rukun Dan Syarat Khulu'

Khulu' terjadi bila memenuhi syarat dan rukunnya, Abdur Rahman al-Juzairi mengatakan rukun *khulu'* ada 5 yaitu :

1. Seseorang yang wajib baginya tebusan (menebus)

Yaitu seseorang yang wajib harta atasnya, adapun seseorang tersebut istri atau selain istri.

2. Kemaluan

Yaitu kemaluan istri yang dimiliki suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan itu, yaitu kemaluan istri jika suami *mentalaq* istrinya dengan *talaq bain* maka hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri.

3. 'Iwad

Yaitu harta yang dikembalikan kepada suami sebagai pemeliharaan

4. Suami

5. Sigat

Adapun syarat *khulu'* menurut Abdur Rahman al-Juzairi ada 3, yaitu :

⁹Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, Cet.10, 1983, hlm. 132

1. Disyaratkan pada tiap-tiap orang yang wajib atasnya *'iwad*, yaitu orang yang ahli menasarufkannya, adapun orang yang wajib atasnya *'iwad* harus tergolong orang yang memiliki hak untuk menjatuhkan *talaq*, dan orang tersebut berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi kanak-kanak wanita, gila, atau *safih* meng*khulu'* suaminya dengan harta.
2. *'Iwad khulu'*, ada beberapa syarat, diantaranya *'iwad* adalah harta yang berharga, maka tidak sah *khulu'* dengan sesuatu yang tidak ada harganya, seperti sebiji dari gandum. Dan barang harus barang yang suci yang dapat dimanfaatkan, maka tidak sah (*'iwad*) dengan khamar, babi, bangkai dan darah. Sah *khulu'* dengan harta, baik berupa uang, tunai atau hasil pertanian, atau mahar. Atau dengan memberi nafkah, atau upah menyusui, atau mengasuh anak.
3. Tidak dapat *khulu'* tanpa *sigat*, tidak sah *khulu'* dengan cara pemberian, seperti ucapan : *khulu'*lah saya dengan itu, maka suami berkata kepada istri saya *khulu'* engkau atas itu, maka ijab dan qabul tidak menyertai hal itu, adapun perbuatan demikian tidaklah jatuh *khulu'* dan perbuatan tersebut tergolong *talaq*.¹⁰

Menurut Muhammad as-Syaraini al-Khatib berpendapat bahwa rukun *khulu'* ada 5, yaitu :

1. Orang wajib atasnya *'iwad*
2. Kemaluan
3. *'Iwad*
4. *Sigat*
5. Suami

¹⁰Abdur Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, hlm. 352-359

Adapun syarat khulu' menurut Muahmmad as-Syaraini ada 3, yaitu :

1. Suami yang sah *talaq*nya, dari budak dan *mahjur 'alaih* sebab *safih* dan ditolak *'iwad* atas miliknya dalam hal *'iwad* oleh majikan dan walinya.
2. Syarat seseorang yang wajib atasnya qabul berupa tuntutan *talaq*, yaitu dapat mentasarufkan harta, jikalau *dikhulu'* budak wanita walaupun mukattab tanpa izin tuannya dengan sesuatu yang jelas dari hartanya atau selain hartanya dengan mahar misil atau dengan utang yang jelas yang dalam tanggungannya, sesungguhnya tuntutan tersebut sesudah merdeka, bila mengajukan khulu' budak tersebut dengan izin tuannya maka *talaq* tersebut diizinkan dengan kewajiban mahar misil dalam tanggungannya dan dari apa yang dalam kekuasaannya (budak wanita) dari harta perdagangan dan jika tidak mampu dengan utang yang dalam tanggungannya yang digantungkan atas kemampuannya untuk membayar. Dan bila *khulu' mahjurah* sebab *safih* terjadilah *talaq raj'iyah* dan sia-sia harta (*'iwad*), atau *khulu'* wanita yang sakit keras maka sah dengan 1/3 atas mahar misil.
3. Kemaluan yang diikhlasakan dengan *'iwad* dan tidak ada ruju' suami atas mantan istrinya dalam *'iddah* kecuali dengan akad nikah baru.¹¹

Abi Yahya al-Ansari berpendapat dalam kitab *Fathul Wahhab* bahwa rukun *khulu'* ada 5 yaitu :

1. Seseorang yang wajib atasnya *'iwad*
2. Kemaluan
3. *'Iwad*
4. Sigat

¹¹Muhammad as-Syaraini al-Khatib, *Iqna*, Daarul Hiya al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, Juz. II, hlm. 146-147

5. Suami

Adapun syarat *khulu'* menurut Abi Yahya al-Ansari ada 5, yaitu :

1. Disyaratkan suami dalam kondisi sehat bila menjatuhkan *talaq*, maka sah dari budak dan orang yang terhalang sebab *safih*, tidak dari orang yang dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, dan orang yang hilang akal nya atau gila.
2. Syarat orang yang berkewajiban menebus dapat diterima tebusannya atau yang dituntut atasnya untuk menasarufkan harta, bila budak wanita meng*khulu'* dengan tanpa izin majikannya dengan sesuatu yang nyata dari hartanya, maka mahar *misil* atas tanggungannya atau dengan utang yang jelas, atau *khulu'*nya dengan izin majikannya, maka wajib mahar *misil* dengan pekerjaannya, dan jika dia kuasa berutang yang digantungkan dengan pekerjaan dan hartanya. Jika *khulu'* *mahjurah* sebab *safih* maka jatuh *talaq raj'i*, dan hartanya sia-sia. Jika wali mengizinkannya dalam *khulu'* karena sesungguhnya dia bukan termasuk ahli menasarufkan harta. Orang yang menderita sakit keras sah *khulu'*nya karena dia berkemampuan menasarufkan hartanya, maka bagi dia 1/3 hartanya untuk *'iwad*.
3. Kemaluan yang dimiliki suami baginya sah *khulu'* dalam *talaq raj'i* tidak dalam *talaq bain*.
4. Sah tebusan walaupun *khulu'*nya dengan barang yang tidak tahan lama atau barang bisa rusak, akan tetapi bukan barang yang najis atau dengan sesuatu yang *goror*.
5. Syarat di dalam sigat apa yang diakadkannya dalam akad jual beli, akan tetapi tidak membahayakan di dalam adanya akad tersebut. Dilafalkan

dengan jelas mudah dipahami dari ucapan *khulu'*, atau dengan *kinayah* seperti *fasakh*, menjual.¹²

Dari beberapa pendapat ulama mengenai rukun dan syarat *khulu'* di atas dapat diambil penjelasan bahwa rukun *khulu'* ada 5, yaitu :

1. Orang wajib atasnya 'iwad
2. Kemaluan
3. 'Iwad
4. Sigat
5. Suami

Adapun syarat *khulu'* ada 5, yaitu :

1. Orang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan mempunyai kecakapan dalam menasarufkan harta tidak terhalang sebab kanak-kanak, safih, gila
2. Suami disyaratkan ketika menjatuhkan talaq dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam kondisi mabuk, kanak-kanak, gila
3. Kemaluan istri yang dapat digunakan suami untuk bersenang-senang, ketika terjadi talaq bain hilanglah kepemilikan suami atas kemaluan istri kecuali dengan akad nikah baru.
4. 'Iwad disyaratkan barang yang suci dan bermanfaat bisa berupa uang, mahar ataupun jasa atau upah menyusui.
5. Sigat disyaratkan ucapan yang jelas dan mudah difahami bisa berupa ucapan sarih ataupun kinayah.

Dalam KHI pada pasal 123 menyebutkan bahwa : "Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

¹²Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *Fathul Wahhab*, Toha Putra, Semarang, Juz. II, hlm. 66-67

Menurut lahiriah Q.S. Al-Baqarah ayat 229 pelaksanaan *khulu'* boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim, tetapi terletak atas kehendak dan kerelaan suami istri. Umar bin Khattab, Usman dan Ibnu 'Umar mengatakan, bahwa *khulu'* boleh dilakukan tanpa diajukan di muka hakim. Ada pula yang berpendapat bahwa ayat itu ditujukan kepada para hakim dan para wali, pendapat ini sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam bacaan hamzah "illa an yukhafa" (bukan yakhafa), dimana pelakunya tidak disebut, yaitu para wali dan hakim, karena dalam ayat itu disebut "fa in khiftum" yaitu jika kamu takut (hai para wali atau hakim)." Kalau ayat itu ditujukan kepada suami istri tentulah kalimat itu "fa in khafa" tidak "fa in khiftum".

Atas dasar bacaan Hamzah itu maka untuk melaksanakan suatu *khulu'* harus di hadapan hakim, inilah pendapat Sa'ad bin Jubair, al-Hasan dan Ibnu Sirin. Syu'ab bertanya kepada Qatadah : "Dari siapa al-Hasan mengambil pendapat bahwa *khulu'* (pelaksanaannya) diserahkan kepada hakim (sultan)? Jawabnya : "Dari Ziyad" ketika ia menjadi gubernur di masa 'Umar dan 'Ali". Pelaksanaan dilakukan di hadapan hakim dan atas putusannya, pendapat ini atas pertimbangan berikut :

- a. Di masa sebelum Islam, seorang suami dapat menjatuhkan *talaq* kepada istri dengan sewenang-sewenang, sesudah ditalaknya, suami melakukan *ruju'* dalam masa '*iddah*'. Pekerjaan yang seperti ini dilakukan berulang-ulang tanpa batasan. Pada permulaan Islam perbuatan demikian masih terus terjadi, hingga turun al-Qur'an yang membatasi jumlah *talaq*. Sekarang di Indonesia telah diatur dan telah ditetapkan tempatnya di muka hakim. Perceraian dengan

cara *khulu'* terpaksa harus dilakukan karena ada sesuatu sebab yang tidak dapat diatasi oleh mereka berdua. Suatu perbuatan hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh dua pihak yang bersangkutan, sudah sepantasnya hakim campur tangan sebagai penegak keadilan di masyarakat, supaya dapat tercegah kecurangan yang merugikan salah satu pihak, baik *khulu'* itu masuk kategori *fasakh* maupun kategori *talaq*, namun pelaksanaannya di Indonesia dilakukan di muka hakim ayat ini turun di masa pemerintahan belum tersusun dengan baik, meskipun demikian orang melakukan *khulu'* di hadapan Nabi saw. dan dilakukan sesudah mendapatkan pertimbangan beliau.

- b. Dengan menyerahkan masalah *khulu'* kepada hakim, maka selanjutnya hakim dapat melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama, seperti pengawasan tentang pelaksanaan pembayaran, masalah keharta-bendaan mereka bersama dan sebagainya, kalau masalah *khulu'* itu dari awalnya berada di tangan hakim tentulah penguasa berusaha sedini-dininya mengatasi berbagai kemungkinan sampingan yang merugikan atau meresahkan sesuatu pihak dalam masyarakat sebagai akibat dari *khulu'* itu.¹³

4. Alasan Khulu' dan Pendapat Ulama

Perceraian perkawinan dengan jalan *khulu'* boleh dilakukan pada waktu istri sedang dalam keadaan kotor maupun bersih, Nabi saw. tidak meminta

¹³Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara Islam)*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, Cet. I, 1988, hlm. 329-330

keterangan lebih dahulu kepada perempuan yang datang kepada beliau yang ingin *berkhulu'*, apakah perempuan itu sedang dalam haid atau tidak.

Khulu' hanya di bolehkan apabila ada alasan yang benar, seperti suami cacat badan, buruk akhlaknya (kejam), atau tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya, sedangkan istri khawatir akan melanggar hak Allah.

As Syauckani berkata : "Menurut zahir hadis-hadis tentang masalah *khulu'* ini, bahwa ketidaksenangan istri sudah boleh jadi alasan *khulu'*, tetapi Ibnu Munzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa ketidaksenangan itu terjadi pada kedua pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat al-qur'an. Demikian pendapat Tawus, Sya'bi dan segolongan besar tabi'in". Tetapi segolongan lain seperti Tabari menjawab : "Bahwa yang dimaksud oleh ayat al-qur'an itu ialah, jika istri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap istri. Jadi ketidaksenangan ini adalah ada dari pihak istri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi saw. tidak bertanya lebih lanjut kepada Sabit apakah ia juga tidak senang kepada istrinya ketika istrinya menyatakan ketidaksenangan padanya.¹⁴

Di dalam UU.No.1 Tahun 1974 pada pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz.8, PT. Ma'arif, Bandung, Cet. I, 1983, hlm. 102

- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *taklik talaq*.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi seorang istri diberi hak untuk mengajukan *khulu'* bila ada alasan yang memang dibenarkan oleh peraturan yang ada dan tidak melanggar aturan syari'at.

B. Mahjur 'Alaih Dalam Perspektif Ulama

1. Definisi Mahjur 'Alaih

Lafal *mahjurun* () berasal dari kata

Artinya dilarang / dicegah

Menurut Ibrahim al-Bajuri *hajar* secara lugat

Artinya : “(Secara bahasa ialah mencegah), juga dinamakan akal, hajrun mencegah orang yang memiliki akal tersebut dari mengatur sesuatu yang tidak layak kepadanya dan inilah makna hajar dengan fathah pada huruf ha, dan adapun hajar dengan kasrah pada huruf ha ,yaitu melepaskan kuda, hijir Ismail, akal, hijir Samud, dicegah, berbohong, melarang berpakaian”.

Dari segi *syara'*

Artinya : "Dan menurut syara' mencegah menasarufkan harta, tidak ditolak pada batasan ini tidak adanya ketetapan yang benar, beberapa pendapat yaitu kanak-kanak, orang gila, dan apa yang di kecualikan dari ibadah anak-anak yang mumaziy".

Abdur Rahman al-Juzairi berpendapat tentang *hajar* dilihat dari segi bahasa, yaitu :

16

Artinya : "Hajar mengandung pengertian secara bahasa mencegah, terkadang dikatakan : hajrun dengan hijran mempunyai arti binasa, mencegah dari melakukan kebinasaan yaitu dengan fathah pada ha dan pada kasrah pada ha, terkadang hijrun bermakna al-hatim, karena sesungguhnya mencegah orang yang akan melakukan tindakan tersebut pada ka'bah dan memutus dari tindakan tersebut, dan terkadang hajran bermakna akal, karena sesungguhnya mencegah orang yang memiliki akal dari perbuatan tercela, Allah berfirman : (Adakah yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) bagi orang-orang) yaitu akal".

Hajar dari segi syariat menurut penjelasan beberapa mazhab mendefinisikan, dari ulama Hanabilah berpendapat

17

Artinya : "Hajar ialah mencegah orang yang memiliki hartanya di dalam mentasarufkan hartanya, (baik itu dicegah dari segi syara' seperti terlarangnya kanak-kanak, orang gila, safih, ataupun menurut hakim, seperti larangan yang diberlakukan hakim terhadap membeli dari menggunakan hartanya sehingga mampu menentukan harganya".

Ulama Syafi'iyah berpendapat

18

Artinya : "Al-hajar secara syara' yaitu mencegah menasarufkan dalam harta karena sebab-sebab orang tertentu, dikecualikan dengan pendapat hajar mencegah menasarufkan di dalam harta, menasarufkan di dalam selain harta maka tidak dicegah di dalamnya, maka sah bagi safih, orang pailit, orang yang sakit mereka menasarufkan di dalam urusan lain seperti khulu', talaq, zihar, dan sumpah dengan apa yang wajib mengiringi, seperti ibadah badaniyah berupa wajibah ataupun sunah, adapun ibadah maaliyah sesungguhnya tidak sampai

¹⁵Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri 'alaa Ibnu Qasimi al-Gayi*, Juz.I, Menara Kudus : Indonesia, hlm. 365

¹⁶Abdur Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, hlm. 310

¹⁷*Ibid*, hlm. 311

¹⁸*ibid*, hlm. 311

menghabiskannya kecuali wajib seperti haji, terjadi perbedaan pada sunah seperti berbuat sunah tambahan maka sesungguhnya sadaqah tidak sampai menghabiskan dari ibadah maliyah. Adapun anak-anak, orang gila, maka sesungguhnya keduanya tidak sah menasarufkan dalam sesuatu secara mutlak”.

Ulama Malikiyah berpendapat

19

Artinya : ”Al-hajru sifat hukmiyah yang menghakimi adalah syari’at karena sifat hukumiyah tersebut dilarang orang yang memiliki sifat hajar tersebut menggunakan harta di dalam apa yang tambah atas kemampuannya, seperti apa yang diwajibkan mencegah dari perbuatan menghabiskan dalam sedekah dengan tambahan atas 1/3 hartanya. Masuk bagian pertama : mencegah atas anak-anak, orang gila, safih dan orang pailit dan seperti mereka, maka sesungguhnya mereka dicegah dari perbuatan di dalam apa yang tambah di atas kemampuan mereka, maka jika menjual salah satu dari mereka sesuatu atau membeli sesuatu gugurlah sesuatu yang dibelanjakannya, ini yang disepakati, dan tidak berlaku kecuali dengan izin wali seperti keterangan bagian depan dalam hal pembelian, dan masuk bagian kedua yaitu pendapat kita seperti apa yang diwajibkan mencegahnya dalam menghabiskan perbuatannya di dalam dermanya dengan tambahan 1/3 harta : dicegah atas orang sakit dan istri, sesungguhnya keduanya tidak dicegah dari tindakan jual beli, sesungguhnya dicegah keduanya dari berderma dengan syarat adanya tambahan 1/3 harta keduanya, maka sah bagi orang yang sakit mendermakan 1/3 hartanya pada orang lain, seperti apa yang sah bagi istri tersebut, adapun apa yang tambah atas 1/3 harta keduanya maka sesungguhnya tidak sah bagi keduanya mendermakannya”.

Ulama Hanafiyah berpendapat

20

Artinya : ”Al-hajar yaitu ibarat dari mencegah orang tertentu, digantungkan dengan seseorang, dari tindakan orang tertentu, atau dari memberlakukan tindakan tersebut, adapun hajar dicegah bagi anak kecil, orang gila, dan seperti keduanya tentang perbuatan dalam ucapan secara langsung jika murni merugikan, maka jika mentalaq istri yang masih anak-anak terhadap suaminya atau membebaskan budaknya maka sesungguhnya ucapan ini tidak ada ikatan sama sekali, karena sesungguhnya merugikan secara murni, maka tidak ada akad dari asalnya, dan seperti pada orang gila”.

Imam Syafi’i berpendapat tentang hajar

¹⁹*ibid.*, hlm. 310-311

²⁰*ibid.*, hlm. 310

Artinya : "Hajar atas keadaan balig dalam kedua ayat dari kitab Allah 'azza wajalla dan keduanya dalam firman Allah: (Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada tuhan, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darinya, jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya/lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar)".

Dan imam Syafi'i dalam ayat lain bahwa hajar ditetapkan atas yatim yang belum balig dan cerdas

21

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya".

Imam Syafi'i memberi pengertian pada ayat tersebut dengan menetapkan perwalian atas *safih*, orang yang lemah dan anak yatim apabila belum balig dan cerdas. *Hajar* dari segi bahasa bisa berarti akal, mencegah, melarang seseorang dari melakukan perbuatan tertentu. Adapun *hajar* dari segi *syara'* yaitu mencegah seseorang dari menasarufkan harta disebabkan ketidakmampuannya menurut penilaian hakim. Yang termasuk dalam kategori *mahjur 'alaih* di antaranya anak kecil, orang gila, *orang pailit*, *safih*, orang yang lemah akalnya dan anak yatim apabila belum balig dan cerdas. Orang tersebut menurut pandangan hukum dilarang untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, *khulu'*, memerdekakan budak. Karena dikhawatirkan tindakan itu merugikan dirinya, namun bila pihak wali mengizinkan, maka diperbolehkan, ini menurut pendapat Malikiyah. Tetapi menurut pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Syafi'i dilarang. Akan tetapi bila melakukan ibadah sunnah tidak ada larangan atas perbuatannya itu,

²¹ Abi Bakar Ahmad, *Ma'rifatu as-Sunan wa al-Asar*, Juz. 4, Daar al-Kutub, Beirut : Lebanon, Hal. 464-465

dan diperbolehkan memberikan sadaqah bila tidak sampai menghabiskan hartanya.

2. Sifat-Sifat Yang Termasuk Mahjur 'Alaih

Sifat-sifat yang termasuk di dalam *hajar* menurut Ibrahim al-Bajuri ada 6, yaitu :

1. Kanak-anak

Yaitu anak laki-laki dan perempuan, dan hilang sifat *hajarnya* bila telah balig dan *rasyid*, yaitu berlaku baik pada harta dan agamanya, dan di dapati *kebaligannya* dengan sempurna pada usia 15 tahun dan dapat dipercaya dalam hal penggunaan harta, dan waktu kemungkinan sempurna 9 tahun atau haid bagi perempuan.

2. Gila

Ditetapkan untuk mencegah pada orang gila dengan tidak menetapkan hukum padanya sehingga sadar, di kala ia sadar ia mempunyai kecakapan bertindak.

3. Safih

Ditetapkan mencegah atasnya dengan ketetapan hakim, jika telah *balig* dan cerdas kemudian berlaku boros maka wajib dicegah dengan penetapan hakim, jika tidak dicegah atasnya ia akan bertindak dengan tidak menggunakan pertimbangan akal, dan jika telah *balig* tidak cerdas maka dicegah atasnya secara syari'at (tidak menunggu ketetapan hakim).

4. Muflis

Dikatakan pailit orang yang banyak utang dan orang tersebut tidak dapat melunasinya.

5. Orang yang sedang sakit

Orang yang dinyatakan akan meninggal secara hukum pada keadaan tertentu, seperti orang yang menderita penyakit *ta'un*, orang yang sedang melakukan perjalanan di laut terkena gelombang besar yang tidak mungkin bisa selamat, orang yang dikepung oleh musuh yang akan membunuhnya. Orang yang menderita penyakit yang keras dicegah bila akan melakukan *tabaru'*, berwasiat yang melebihi dari 1/3 hartanya.

6. Budak tanpa izin tuannya berdagang

Seorang budak walaupun *mukallaf* dan *rasyid*, tidak sah melakukan dagang tanpa izin tuannya, dan juga tidak sah melakukan hubungan muamalah. Dibolehkan beribadah tanpa izin tuannya, dilarang melakukan perwalian kecuali bila mendapatkan izin dari tuannya.²²

Menurut Abdur Rahman al-Juzairi yang termasuk dalam kategori sifat *hajar* ada 4 yaitu :

1. Kanak-kanak

Sifat anak-anak merupakan sifat yang melekat kepada diri manusia ketika belum mengalami mimpi keluar mani, sebab sifat tersebut belum adanya kesempurnaan pada kekuatan sifat *basyariah*. Anak-anak dapat diketahui masa balig dengan melihat ucapannya dan melakukan hubungan muamalah. Ulama Hanafiyah berpendapat *balig* pada anak laki-laki dapat diketahui dengan keluarnya mani, dan anak wanita dengan keluarnya darah haid. Abu Hanifah berpendapat bahwa anak laki-laki jika telah berumur 18 umur, dan anak wanita berumur 17 tahun, juga dilihat pada sifat *rasyid* ketika melakukan hubungan muamalah, bila tidak *rasyid* maka dicegah atasnya. Malikiyah berpendapat *balig*nya anak-anak dapat diketahui dengan

²²Ibrahim al-Bajuri, *op.cit*, hlm 365-367

keluarnya mani pada anak laki-laki, pada anak wanita dapat diketahui dengan keluarnya darah haid. Syafi'iyah berpendapat bahwa diketahui *balig* pada anak laki-laki dan wanita ketika berumur 15 tahun, dan diketahui dari sifat *rasyidnya* dalam melakukan hubungan muamalah. Hanabilah berpendapat bahwa diketahuinya *balig* pada anak laki-laki dan wanita ketika keluar mani pada anak laki-laki, dan keluarnya darah haid pada anak wanita.

2. Orang gila

Orang gila dalam dihukumi seperti orang yang tidak punya akal sama seperti anak-anak yang tidak mumaziy dalam segala tindakannya, maka setiap tasarufnya dipandang batal, baik itu yang bermanfaat atau madarat. Ketika dia melakukan perbuatan yang menyangkut harta harus ditaruh di bawah walinya, seperti memberi *hibah*, membayar hutang, menjatuhkan *talaq*, melakukan jual beli, *syirkah*.

3. Safih

Diwajibkan bagi *safih* melakukan ibadah fardu yang berhubungan dengan harta seperti zakat, akan tetapi tidak berhubungan dengan menasarufkan harta. Sah *nazar*nya untuk melakukan ibadah haji, puasa, salat. Dan tidak sah hibah dan wakafnya, karena hal itu merupakan perbuatan *tabaru'* dengan harta, karena dia dipandang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan *tabaru'*. Dia tidak sah melakukan *syirkah*, *hawalah*, *daman*, *kafalah*. Jika dia berikrar pada orang lain dengan harta maka sah ikrarnya, akan tetapi tidak perlu dengan menggunakan harta ketika dalam kondisi *safih*, bila telah hilang sifat *safihnya* maka harta di

perlukan. Orang *safih* dalam pandangan hukum harus ditaruh di bawah perwalian.

4. Pailit

Dicegah atas orang yang pailit dalam bertasaruf yang bersifat *maaliyah* hingga tidak sampai menghilangkan hak-haknya dalam hartanya, jika orang yang *mahjur 'alaih* sebab hutang melakukan nikah maka sah nikahnya. Namun bila melakukan jual beli, hibah, ikrar maka dipandang tidak sah.²³

Dari pendapat ulama di atas yang tergolong mahjur 'alaih yaitu ada 5, yaitu :

1. Kanak-kanak, dicegah dari menasarufkan harta hingga kanak-kanak tersebut telah balig, dan rasyid.
2. Mufлис, dicegah dari menasarufkan hartanya kecuali bila utang-utangnya telah dilunasinya.
3. Gila, dicegah dari menasarufkan harta hingga telah kembali akalnya.
4. Budak, dilarang menasarufkan hartanya kecuali apabila diizinkan oleh tuannya.
5. Orang yang sakit keras, dilarang menasarufkan hartanya kecuali apabila dia menasarufkan tidak lebih dari 1/3 hartanya.
6. Safih, *safih* menurut Muhammad Yunus bisa berarti bodoh, tiada berilmu.²⁴

Safihah menurut ulama Hanafiyah ialah wanita yang menghamburkan hingga melenyapkan hartanya tidak pada ketentuan syara'. Wanita yang *safih* sebenarnya akalnya sehat dan sempurna, sebab ia termasuk *mukallaf* dan dapat melakukan perbuatan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat

²³Abdur Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, hlm. 324-336

²⁴Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Hida Karya Agung : Jakarta, Cet.8,1990,

memahami dalil-dalil penetapan hukum. Dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya. Jika seseorang telah memasuki periode balig dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak-sempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Orang yang safih dilarang menasarufkan hartanya,

BAB III

ISTINBAT HUKUM DAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I TERHADAP HUKUM

KHULU' ISTRI SAFIAH

A. Biografi Imam Syafi'i

1. Latar Belakang Keluarga

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab Syafi'i, nama lengkapnya ialah al-imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Abbas ibnu 'Usman ibnu Syafi'i al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-Syafi'i. Ia lahir di Gazza masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), sebuah perkampungan di Palestina, bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi. Yatim ini kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah dan di sanalah ia dibesarkan. Lingkungan Arab Mekkah waktu itu membuat anak cenderung dari kecil mulai belajar tulis baca, kemudian belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama dan belajar memanah. Kedudukan seseorang dalam masyarakat waktu itu sangat ditentukan oleh kebolehan seseorang dalam masing-masing bidang tersebut. Imam Syafi'i dibesarkan dalam suasana yang demikian dan telah pula mengikuti arah pendidikan tersebut. Pada usia menjelang umur 9 tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran tulis baca, bahkan pada usia itu ia telah hafal 30 juz al-Qur'an, dan menguasai sejumlah hadis Rasulullah saw. Untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ia meninggalkan ibunya, menuju suatu perkampungan Bani Huzail, sebuah kabilah yang terkenal baik bahasa Arabnya.

2. Pendidikan

Imam Syafi'i pergi dan tinggal di kabilah Bani Huzail untuk mendalami bahasa Arab dan belajar memanah. Selama 10 tahun beliau ikut bersama Bani Huzail, sampai dalam ahli bahasa Arab dan memanah, kemudian ia kembali kepada ibunya di Mekkah, dan terkenal sebagai seorang ahli bahasa dan sering menyajikan syair dan kasidah-kasidah yang amat menakjubkan penduduk kota tersebut, setelah beberapa waktu rupanya imam Syafi'i merasa tidak puas kalau ia hanya ahli bahasa. Seorang temannya menasehatinya agar ia mendalami fiqh dan hadis.

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Semenjak itu ia memusatkan perhatiannya untuk mempelajari dua bidang ilmu tersebut. Dari seorang ulama terkenal di Mekkah yaitu Muslim bin Khalid Zanji. Ia mempelajari dan mendalami ilmu fiqh, sampai gurunya itu mengizinkannya untuk berfatwa. Setelah beliau menimba ilmu pengetahuan di Mekkah dan setelah menghafal kitab *al-Muwatta'*, ia pun berangkat ke Madinah untuk belajar dengan imam Malik, imam Daar al-Hajrah, Syafi'i menimba ilmu kepada imam Malik dari mulai datangnya ke Madinah (164 H) sampai wafat imam Malik (174 H). Di negeri itu beliau juga sempat belajar kepada beberapa orang ahli ilmu fiqh terkenal, dari Madinah beliau berangkat ke Yaman. Di negeri itu beliau dapati fiqh peninggalan Mu'az bin Jabal yang ia terima melalui Mutraf bin Mazin (wafat 220 H) dan Hisam bin Yusuf. Kemudian dari Amru bin Salamah di Yaman ia mempelajari fiqh Auza'i seorang fakih Syam dan kepada Yahya bin Hasan ia pelajari pula fiqh al-Lais seorang faqih Mesir. Dari Yaman ia berangkat ke Irak (184 H) di masa Harun ar-Rasyid, dan di sana ia bertemu mazhab *ahlu'arra'yi* (aliran fiqh yang banyak menggunakan akal fikiran). Di

negeri itu imam Syafi'i berdiskusi dengan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani pembela mazhab Hanafi, yang juga pernah berguru kepada Imam Malik setelah gurunya Abu Hanifah wafat. ¹

4. Situasi Politik

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Mekkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Beliau juga belajar hadis pada Sofyan bin Uyainah guru hadis di Mekkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada saat itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali, pada waktu itu Syafi'i dituduh memihak kepada Ali, dan ketika pemuka-pemuka Syi'ah digiring kepada khalifah, pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama, tetapi karena rahmat Allah beliau selamat pada waktu itu. Atas bantuan al-Fadil ibnu Rabi', yang pada waktu itu, menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah beliau bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu as-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekkah dan pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab qadimnya sewaktu di Irak, dan mazhab jadidnya sewaktu di Mesir. ²

5. Karya- karya Imam Syafi'i

¹IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, hlm. 885

²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cet. IV, 2002, hlm.

Setelah sekian lama mengembara dan menuntut ilmu dan mengetahui dari dekat aliran-aliran fiqh dewasa itu, ia pun kembali ke Makkah. Di negeri itu beliau mulai mengajarkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dan mengemukakan ide-ide baru dalam bidang pemikiran hukum Islam, terutama mengenai kaidah-kaidah yang akan dijadikan pedoman dalam memakai *nas* al-Qur'an dan hadis dan sistem istimbat. Ide-ide tersebut dibawanya bersama pergi ke Irak kesekian kalinya, waktu ia berada di Irak. Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama hadis di Mekkah berkirim surat kepadanya agar ia dapat menyusun sebuah buku pedoman dalam memakai *nas-nas* al-Qur'an dan hadis dan cara berijtihad. Memenuhi permintaan tersebut, imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang kemudian diberi nama *ar-Risalah*. Kitab yang dikarangnya waktu ia berada di Irak ini kemudian terkenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah lama). Setelah ia berada di Mesir, *Risalah* itu ditinjau kembali dan disusun baru yang terkenal dengan *ar-Risalah Jadidah* (Risalah baru). Selama di Mesir di samping menulis kitab *al-'Umm*, beliau juga menulis kitab yang dikenal dengan nama *al-Imla'* dan *al-Amali*.³ Berbagai pandangan baru Syafi'i muncul di Mesir, sehingga dalam fiqh Syafi'i ditemukan dua pendapat (*qaul*) yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, *qaul qadim* (pendapat lama) adalah pendapat-pendapat beliau sebelum berada di Mesir, yaitu ketika masih berada di Baghdad dan Makkah. Sementara *qaul jadid* (pendapat baru) adalah pandangan-pandangan yang lahir setelah Syafi'i bermukim di Mesir, perubahan pandangan ini disebabkan oleh perbedaan adat dan tradisi masyarakat yang berbeda dengan apa yang ia rasakan ketika berada di

³Hasbi as-Shidqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, Cet.I, 1973, hlm. 235

Makkah, Hijaz dan Irak (Baghdad), dengan perbedaan ini maka Syafi'i berubah pendapatnya dalam berbagai masalah yang tidak cocok dengan lingkungan Mesir, di samping itu juga ketika Syafi'i berada di Mesir banyak bergaul dengan para ulama dan banyak mendengar dan menemukan hal-hal yang belum didapat sebelumnya, baik berkenaan dengan hadis maupun fiqh. Sebagai seorang ulama yang mempunyai kedalaman dan keluasan ilmu pada masanya.

6. Murid-murid Imam Syafi'i

Syafi'i banyak punya pengikut dan murid, yang nantinya sangat besar jasa mereka dalam mengembangkan mazhab Syafi'i baik di Makkah, Irak maupun di Mesir. Di antara murid Syafi'i yang terkenal adalah Abu Bakar al-Hamaidi (wafat 219 H) dari Makkah yang kemudian turut serta bersama Syafi'i ke Mesir, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Muhammad (wafat 237 H), Abu Bakar Muhammad ibnu Idris, Abdul Wahid dan Musa ibnu Jarad. Murid beliau di Baghdad adalah Abu Ali al-Hasan al-Za'farani (wafat 260 H) banyak menukil pendapat beliau dan paling terkenal di Baghdad. Di samping itu murid beliau yang terkenal adalah Abu Ali al-Husain, yang nantinya mengembangkan mazhab sendiri. Adapun murid-murid Syafi'i di Mesir adalah Harmalah ibnu Yahya (wafat 266 H) yang cukup besar jasanya meriwayatkan kitab-kitab Syafi'i, dan Abu Ya'kub Yusuf ibnu Yahya al-Buati seorang yang sangat dihargai dan disayangi Syafi'i serta ditunjuk oleh beliau sebagai penggantinya. Al-Buati wafat pada tahun 231 H dalam penjara karena tidak mau menyatakan al-qur'an itu baru. Sejumlah murid Syafi'i yang lain adalah Abu Ismail ibnu Yahya al-Muzani, ibnu Abdul Hakam (wafat 268 H), al-Muzani yang banyak mempunyai kitab

Syafi'i dan menulis kitab *al-Mabsut* dan *al-Mukhtasar Min 'Ilm al-Syafi'i*, imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H di Mesir.⁴

B. Metode Istibat Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan ulama yang bersifat moderat (*tawasut*) yaitu corak pemikiran fiqh dan teori ushul yang dikembangkan mengambil jalan tengah antara *ahlu al-ra'yu* dan *ahlu al-hadis* (*annahu ja'a mu'tadilan baina al-ra'yi wa ahli al-hadis*). Meskipun beliau mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat. Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istibat hukum beliau menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Al-qur'an

Al-qur'an merupakan kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi saw dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara *mutawatir*, dari generasi ke generasi, hingga sampai sekarang ini. Penukilan secara *mutawatir* ini al-qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat menghafal dan menyampaikan pula kepada orang banyak, dan dalam penyampaianya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Al-qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam, seluruh *fuqaha* dan umat Islam menyatakan bahwa al-qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam, sebagaimana tertera dalam Q.S. Hud ayat 17

Artinya : "Alim lam Ra. (inilah) kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara rinci. (yang diturunkan) dari sisi (Allah) yang maha bijaksana, maha teliti"

⁴Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet.I, 1999, hlm. 31-32

yang dimaksud terperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai tauhid, hukum, kisah, ilmu pengetahuan, janji dan perintah dan lain-lain, disusun surah demi surah, ayat demi ayat, dan seterusnya.⁵

2. Sunnah Nabi saw.

Menurut istilah *syara'*, sunnah ialah sesuatu yang datang dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*). *Sunnah qauliyah* ialah hadis-hadis Nabi saw. yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks, misalnya sabda Nabi saw

Artinya : "Tidak ada mudarat dan tidak pula boleh membuat madarat"

Sunnah fi'liyyah ialah perbuatan-perbuatan Nabi saw. sebagaimana tindakannya menunaikan salat 5 waktu dengan cara-caranya dan rukun-rukunnya, perbuatannya melaksanakan manasik haji, dan putusannya dengan berdasarkan seorang saksi dan sumpah dari pihak terdakwa.

Sunnah taqririyah ialah sesuatu yang timbul dari sahabat Nabi saw. yang telah diakui oleh Nabi saw. baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pengakuan tersebut adakalanya dengan sikap diamnya dan tidak adanya keingkaran beliau, atau dengan adanya persetujuannya dan adanya pernyataan penilaian baik terhadap perbuatan itu. Dengan adanya pengakuan dan persetujuan ini, maka perbuatan itu dianggap muncul dari Nabi saw. sendiri, seperti hadis yang diriwayatkan Mu'az bin Jabbal yang ditanya Nabi ketika akan menetapkan hukum bila di al-qur'an dan as-sunnah tidak ada, maka Mu'az menjawab akan berijtihad.⁶

Mengenai *khobar ahad* (*sunnah ahad*) imam Syafi'i berpendapat dalam *ar-Risalah*

⁵Depag RI, PT. Syaamil Qur'an, *op. cit.*, hlm. 221

⁶Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Toha Putra : Semarang, Cet. I, 1994, hlm.

Artinya : "Dan tidaklah dapat diterima suatu hujjah hanya dengan suatu khabar yang khusus sehingga terkumpul beberapa alasan-alasan".

7

Artinya : "Dan di antaranya : Hendaklah orang yang meriwayatkannya kuat hafalannya, terkenal kebenarannya dalam perkataannya, diterima oleh akal pada setiap yang diriwayatkannya mengetahui apa yang terkandung pada setiap lafal-lafal makna hadis. Dan hendaklah huruf-huruf dari setiap yang disampaikan itu sama seperti apa yang dia dengar. Dan tidaklah disampaikan hal itu berdasarkan arti, karena kalau disampaikan berdasarkan artinya tidak akan bisa diketahui apa yang terkandung di dalam ma'nanya tersebut : - Dia belum mengetahui uraian dari halal terhadap haram. Dan ketika dia menyampaikannya dengan huruf-hurufnya, maka bila belum tetap pendiriannya, dikhawatirkan hilangnya hadis itu. Terjaga hafalannya apabila menyampaikan hadis tersebut dari yang dia hafalkan, menjaga kitabnya jika dia menghafalkan dari kitabnya. Jika berserikat orang-orang yang hafal dalam hadis menyetujui hadis mereka, bersih dari perbuatan curang : Diriwayatkan dari orang yang bertemu tidak cukup hanya mendengarnya saja, dan diriwayatkan dari Nabi saw apa yang benar tidak berlainan (dari yang disampaikan) Nabi saw.

3. Ijma'

Para ahli usul fiqih mendefinisikan *ijma'* ialah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Nabi saw. wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum itu, maka kesepakatan itu mereka sebut *ijma'*. Hukum tersebut merupakan rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaaan dalam hukum *syara'*, dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan. Karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang, Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa :

⁷Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *ar-Risalah*, hlm. 369-371

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu".⁸

Dalam hal *ijma'* imam Syafi'i meriwayatkan sebuah *asar*, bahwa khalifah Umar bin Khattab ra. suatu hari memberikan khutbah di Syam, kemudian beliau berkata sebagai berikut :

9

Artinya : "Suatu ketika Rasul saw. berdiri di hadapan kita (para sahabat) sebagaimana saya berdiri di hadapan kalian, kemudian bersabda, kalian muliakanlah para sahabatku, kemudian generasi sesudahnya (tabi'in), kemudian generasi sesudahnya lagi (tabi'it tabi'in). Setelah generasi itu, maka muncul kebohongan, sehingga ada seseorang yang bersaksi, padahal ia tidak diminta untuk menjadi saksi, ingatlah barang siapa ingin masuk surga, maka ikutilah para jama'ah, karena setan itu bersama orang yang menyendiri, dan ia akan lebih jauh kepada 2 orang (dibanding hanya seorang) jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan suami istri, dan bukan mahram berkhawat, maka setanlah teman ketiga, barang siapa gembira atas keadaannya dan bersedih atas kejelekan perbuatannya, maka ia adalah orang mukmin sejati".

4. Qiyas

Pengertian *qiyas* menurut ulama ushul ialah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada *nasnya* dalam al-qur'an dan hadis dengan cara menyamakan/menganalogkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nas*. Mereka juga membuat definisi lain : "*qiyas* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nas* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nas* hukumnya karena adanya persamaan '*illat* hukum".¹⁰

Untuk mengetahui dan menggali '*illat* dari *nas-nas* hukum, merupakan tugas pekerjaan ahli fiqih (*faqih*) yang cermat dengan menganalisis *nas-nas* hukum dan melakukan pemahaman secara mendalam serta mengetahui tujuan legislasi hukum Islam, baik tujuan umum maupun khusus. Berkaitan

⁸Abdul Wahhab Khalaf, *op .cit.*, hlm. 85

⁹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 473-474,

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus : Jakarta, Cet. 9, 2005, hlm.

dengan hal tersebut, lebih tepat dikemukakan di sini apa yang pernah ditegaskan oleh imam Syafi'i dalam penjelasannya mengenai kriteria ahli *qiyas*. Beliau mengatakan : "Tidak sepatasnya seseorang menjadi hakim, tidak sepatasnya seseorang meninggalkan menjadi hakim, tidak seyogyanya seorang mufti memberikan fatwa kepada orang lain, kecuali ia telah menjadi orang alim yang mengetahui al-kitab, *nasikh-mansukh*, dalil khusus dan umum, mengetahui sunnah-sunnah rasul dan pendapat-pendapat ulama, baik klasik maupun kontemporer, mengerti bahasa Arab, mampu menganalisis dan membedakan hal-hal yang serupa dan paham benar tentang *qiyas*. Dengan uraian di atas, imam Syafi'i hendak mengatakan bahwa tidak dibenarkan menggunakan *qiyas* kecuali orang yang mengetahui sumber-sumber asli sandaran *qiyas*, maksud dan tujuannya, serta memiliki kemampuan mengetahui 'illat-'illat hukum yang signifikan dengan sasaran, tujuan dan kemaslahatan hukum yang telah ditetapkan.¹¹

5. Istishab

Istishab menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya perhubungan, sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqih, ia adalah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahan keadaan tersebut, atau ia adalah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa yang lalu dan masih tetap pada keadaannya itu, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.¹²

Istishab diterima sebagai sumber hukum bisa dilihat dari segi *syara'* maupun akal, ternyata berdasarkan *istiqla'* (penelitian) terhadap hukum-

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Ibid.*, hlm. 379-380

¹²Abdul Wahhab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 127

hukum *syara'* disimpulkan bahwa hukum-hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil-dalil yang ada sampai ada dalil lain yang mengubahnya.¹³

C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang *Khulu'* Suami Terhadap Istri Safiah

Terhadap *khulu'* suami terhadap istri yang *mahjur 'alaih* imam Syafi'i berpendapat dalam *al-Umm*

14

Artinya : "Apabila seorang suami mengkhulu' istri yang mahjur 'alaih (terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak batal, baginya (suami) berhak ruju', meskipun talaq yang dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain dan baginya ruju'".

Dari pendapat imam Syafi'i bahwa *khulu'* datangnya bisa dari pihak suami yang ditujukan kepada istri, *mahjur 'alaih* yang dimaksud imam Syafi'i disini ialah seorang yang *safih*, seperti pendapat beliau dalam kitab *al-Hawil al-Kabir*

Artinya : "Maka jika dikatakan" maka engkau belum boleh melepaskan (hijr) dari sebabnya ia merusak (menghancurkan) harta ?Dikatakan bukan sebab itlaf al-mal (merusakkan harta), bukankah engkau melihat sesungguhnya ia telah tiada kemudian istrinya tidak mewarisi (harta)nya dan ia tidak berhak menghibahkannya dan juga menjualnya, dan ia juga tidak berhak mendapatkan warisan dan harta dari penjualannya dan tidak pula memiliki hartanya, kemudian pokoknya hamba itu termasuk kategori harta, sedangkan istri bukanlah harta. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya seorang hamba diperbolehkan berdagang dan nikah, maka hamba tersebut berhak untuk mentalaq ataupun menahannya (imsak) tanpa izin tuannya, dan tuannya berhak mengambil seluruh harta benda budaknya.

15

Artinya : "Imam Mawardi berkata : "itulah yang dimaksud imam Syafi'i tentang sahnya talaq orang yang dihijr sebab safih, ini adalah pendapat mayoritas fuqaha".

Imam Syafi'i memberlakukan status safih pada kondisi yatim yang belum rasyid berdasarkan firman Allah

Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

¹³Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 452

¹⁴Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm. 53

¹⁵Abi al-Hasan 'Ali, *al-Hawil al-Kabir*, Juz.8, Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, hlm. 363

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”.

16

Artinya : ”Allah (azza wa jalla) memerintahkan untuk memberikan harta mereka (anak yatim) pada mereka ketika telah berkumpul pada mereka balig dan rasyid”.

Dari pendapat imam Syafi’i bahwa seorang istri yang *mahjur* apabila dikhulu’ oleh suaminya jatuh *talaq raj’i*, disebabkan kondisi istri yang *safih* yang dianggap belum cakap menggunakan harta hingga belum terdapat pada dirinya sifat *balig* dan *rasyid*, berdasarkan pendapat beliau

Artinya : ”Jika menerapkan *hijr* pada orang yang mendekati *balig* yang sudah mampu berfikir untuk dirinya sendiri dan menjaga hartanya adalah wajib, maka ketika sudah *balig* dia malah sangat boros dan banyak merugikan dirinya sendiri, menerapkan *hijr* untuknya (yang sudah *balig*) tidaklah wajib. Maksudnya, perintah *hijr* tetap ada, hanya saja tidak wajib”.

Dalam hal ini al-Mawardi berkata

17

Artinya : ”Hal ini sama halnya dengan pernyataan imam Syafi’i yang lain bahwa : orang *safih* yang sering membubazirkan hartanya wajib dikenai *hijr* walupun sudah *balig*”.

¹⁶Abi Bakar Ahmad, *Ma’rifatu as-Sunan wal Asar*, Daar al-Kutub al-Alamiyyah, Beirut : Lebanon, hlm.464-465

¹⁷Abi al-Hasan ‘Ali, *op. cit*, hlm. 354

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ULAMA LAIN TENTANG KHULU' SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP ISTRI SAFIHAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Ulama

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah *balig* dan berakal, mereka juga sepakat bahwa istri yang *safihah* tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin walinya. Dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*nya manakala diizinkan oleh walinya. Seluruh mazhab, kecuali Hambali, sepakat bahwa *balig* dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan *khulu'*.¹

Dalam hal ini *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang *mahjur 'alaiha* imam Syafi'i berpendapat

2

Artinya : “Apabila seorang suami mengkhulu' istri yang mahjur 'alaiha (terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak batal, baginya (suami) berhak ruju', meskipun talaq yang dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain dan baginya ruju'”.

Pendapat serupa yang mensahkan *khulu' safihah* disampaikan para ulama fiqih mazhab Syafi'iyah di antaranya Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahhab* berpendapat

3

Artinya : “Apabila melakukan khulu' mahjurah sebab kesafihannya maka terjadi padanya talaq raj'i, dan batal harta yang disebutkan, meskipun wali memberi izin, karena sesungguhnya dia (mahjurah) tidaklah dari ahli menasarufkan harta dan wali tidak boleh menasarufkan hartanya pada sepadan itu, apabila hal itu sesudah dukhul apabila tidak maka jatuh

¹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Basrie Press : Jakarta, Cet. I, 1994, hlm. 186-188

²Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm.53

³Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *op. cit.*, hlm.67

talaq bain dengan tanpa harta, Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, apabila maka tidak diterima tidak jatuh talaq seperti apa yang mereka pahami dari apa yang disebutkan”.

Ibnu Ibrahim al-Bajuri berpendapat

4

Artinya : “Dan khulu’ mahjurah safihah itu jatuh talaq raj’i dan sia-sia harta yang disebut, walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya dia tidak termasuk dari ahli wajib atasnya harta dan tidak boleh bagi walinya menasarufkan hartanya pada hal serupa itu, selama tiada kekhawatiran atas hartanya dari suami dan tidak dapat menyerahkannya, kecuali hal demikian”.

Abi Ishaq Ibrahim berpendapat

5

Artinya : “Dan tidak boleh bagi safihah melakukan khulu’ dengan sesuatu dari hartanya karena sesungguhnya dia tidak tergolong dari ahli menasarufkan di dalam harta, maka jika suami menjatuhkan talaq padanya dengan sesuatu dari hartanya, maka dia tidak berhak menerima darinya sesuatu seperti apa yang dia tidak berhak meminta harga sesuatu yang dijual kepadanya, jika terjadi khulu’ setelah dukhul maka bagi suami meruju’nya seperti apa yang telah kita sebutkan”.

Pendapat imam Syafi’i juga didukung oleh ulama Syafi’iyyah dalam

Kitabul Fiqih ‘ala Mazahibul Arba’ah

6

Artinya : “Jika keadaan penebus itu mahjur ‘alaih sebab safih maka sesungguhnya tidak berkewajiban menyerahkan harta atasnya untuk ‘iwad khulu’, walaupun dengan izin walinya, jikalau wali memberi izin pada seorang istri yang mahjur ‘alaiha sebab kesafihannya, hal ini seorang istri bila mengkhulu’ suaminya dengan harta maka tindakannya tidak wajib harta atasnya, karena sesungguhnya dia tidak tergolong ahli yang berkewajiban (dalam harta), dan tidak boleh bagi walinya memberikan hartanya pada sesuatu yang menyerupai ‘iwad khulu’, kecuali jika dikhawatirkan hartanya lenyap dengan lantaran suami, maka diizinkan khulu’ dengan menggunakan harta untuk melindungi hartanya, maka sesungguhnya sah dalam hal ini”.

Ulama Hanafiyah berpendapat:

⁴Ibnu Ibrahim al-Bajuri, *op.cit.*, Juz.III, hlm. 140

⁵Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi’i*, Juz. II, Daarul Kutub al-‘Alamiyah : Beirut, Lebanon : hlm. 490

⁶Abdur Rahman al-Juzairi, *op.cit.*, hlm. 357

Artinya : ”Adapun wanita yang safihah ialah wanita yang sampai menghamburkan, merusakkan melenyapkan hartanya menyia-nyiakan tidak dalam ketentuan syar’i, jikalau safihah mengkhulu’ suaminya atas harta jatuhlah talaq dan tidak wajib atasnya harta. Kemudian bila menggunakan lafal khulu’ dan sepadannya dari lafal sindiran khulu’ maka terjadi bain dan bila dengan lafal talaq maka jatuh raji’”.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat :

8

Artinya : “Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak sah pada wanita yang safihah dan tidak sah pada budak wanita melakukan khulu’ pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang cenderung dengan sifat ini, bila khulu’ wanita yang bodoh (safihah) terhadap suami dengan harta dan suami menerima, maka tidak sah khulu’ dan wajib pada suami menolak pemberian harta yang diterimanya, kecuali jika diizinkan wali atau majikan dalam melakukan khulu’, maka sesungguhnya khulu’nya sah dan wajib memberikan tebusan, adapun wanita safihah tidak ada wali baginya”.

Dari ulama lain berlainan pendapat dengan imam Syafi’i dalam hal keabsahan khulu’ safihah, di antaranya yaitu ulama Hanabilah yang berpendapat :

9

Artinya : “Disyaratkan ‘iwad bagi orang yang mampu menggunakan hartanya, maka tidak sah khulu’ dengan ‘iwad dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita sebab safihah, walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta khulu’ merupakan harta yang didermakan (tabaru’) dan tidak diizinkan oleh walinya dalam mendermakannya, dan ini merupakan pendapat beliau yang masyhur.

Abi Muhammad Abdillah bin Qudamah berpendapat

10

Artinya : “(Jika khulu’ wanita mahjur ‘alaiha mengkhulu’ maka hukumnya tidak sah khulu’, dan menjadi talaq raj’i, adapun kalau penanggungan itu karena pailit maka sah khulu’nya dan wanita tersebut memberikan ‘iwad). Karena sesungguhnya wanita tersebut mempunyai tanggungan yang mana ia boleh bertransaksi di dalamnya, maka jika dia telah mampu maka ‘iwadnya harus dia bayar, dan orang yang menghutangi tidak berhak menagihnya selama dia masih menjadi tanggungan walinya, sebagaimana dia hutang pada seseorang atau menjual sesuatu yang menjadi tanggungan wanita tersebut, sedangkan dia menjadi tanggungan walinya karena safih masih kecil, atau karena gila, maka tidak boleh menyerahkan ‘iwad dari wanita tersebut,

⁷ibid, hlm. 353

⁸ibid, hlm. 355

⁹ibid, hlm. 358

¹⁰Abi Muhammad Abdillah bin Qudamah, *al-Mugni*, Lebanon : Daar al-Kutub, Juz. 8, hlm.

karena penyerahan 'iwad tersebut sebagai bentuk transaksi dengan harta, padahal wanita tersebut tidak berhak melakukan transaksi, baik itu telah mendapat izin dari wali ataupun tidak, karena wali itu tidak berhak memberikan izin kepada hal-hal yang bersifat tabarru' (sukarela), pada kasus ini disamakan dengan tabarru', hal ini berbeda dengan budak (wanita), karena dia mempunyai hak untuk bertransaksi, dia juga berhak memberikan hibah dengan izin tuannya, berbeda juga dengan budak (wanita) pailit karena dia juga termasuk yang berhak melakukan transaksi, jika wanita safihah mengajukan khulu' dengan kata-kata yang mengarah kepada talaq maka terjadi talaq raj'i dan suami tidak berhak mendapatkan 'iwad dan jika kalimat itu tidak mengarah kepada talaq maka hal itu menjadi khulu' tanpa 'iwad, ada kemungkinan bahwa tidak terjadi karena suami itu rela dengan talaq yang memakai 'iwad, dan itu tidak terlaksana dan tidak mungkin ruju' dengan menyerahkan 'iwad tersebut“.

Dari pendapat imam Syafi'i mengenai *khulu' safihah* nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam, di antaranya :

1. Keabsahan khulu' terhadap wanita safihah

Terhadap pendapat imam Syafi'i yang mensahkan *khulu'* yang dilakukan suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safihah* dengan harta, harta tidak batal. Penulis sependapat, konsep khulu' menurut imam Syafi'i bahwa khulu' datangnya bisa dari permintaan istri kepada suaminya, seperti ucapan istri kepada suaminya ” *khulu'* lah aku dengan seribu, adapun bagimu seribu.¹¹ Dari pendapat imam Syafi'i khulu' yang dijatuhkan suami terhadap istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safih* dengan harta, harta tidak batal, menurut penulis seorang wanita bila telah menikah berarti dia telah melakukan perbuatan hukum dan dia mempunyai kewenangan untuk menggunakan haknya ketika terjadi ketidakharmonisan terhadap suami, yang mana bila dia tetap dalam ikatan pernikahan dengan suami dalam kondisi tersebut dikhawatirkan akan terjadi mudarat pada dirinya, berdasarkan qaidah :

¹¹Imam Syafi'I, *al-Umm*, hlm. 57

Artinya : " kemadaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin "

istri *safihah* berbeda dengan anak kecil dan orang gila, sebab dia sudah *mukallaf*, dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 menetapkan seseorang yang tidak cakap hukum harus ditaruh dibawah *curratel* kecuali jika telah menikah, jadi bila seorang wanita apabila sudah menikah dianggap sebagai orang yang cakap hukum dan sah bila meminta *khulu'* kepada suaminya, meskipun nantinya yang menjatuhkan *khulu'* suaminya.

Seorang wanita apabila telah menikah ia dianggap mempunyai *ahliyyah* untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan pengertian *ahliyyah*, para ulama membagi *ahliyyah* ini menjadi beberapa macam, dan macam *ahliyyah* itu tidak sekaligus semua terdapat pada diri seseorang, melainkan adanya secara bertahap sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya sebagaimana yang dilalui dalam perodesasi hidupnya, jadi manusia dalam perjalanan hidupnya dari periode ke periode, semakin sempurna dalam memiliki atau mendukung macam *ahliyyah*. Adapun *ahliyyah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Ahliyyatul wujub* atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya, yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya, selanjutnya *ahliyyatul wujub* dibedakan lagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. *Ahliyyatul wujub naaqisah* atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang

¹²Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, hlm.

diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan warisan, hak nafkah dari suami

- b. *Ahliyyatul wujubil kaamilah* yaitu kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga untuk menunaikan kewajiban. dasar bagi adanya *ahliyyatul wujub* pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya.

2. *Ahliyyatul ada'* atau kecakapan bertindak, adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang syah menurut *syara'*, contoh melakukan puasa, haji, solat.

Dan hal-hal yang menjadi penghalang kecakapan atau '*awaaridul ahliyyah* (penghalang-penghalang kecakapan) bagi seseorang terjadi karena datang dari diri manusia sendiri atau '*awaaridul muktasabah* seperti *safih*, mabuk. Dan datang bukan dari diri manusia seperti : gila, rusak akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, haid dan nifas, meninggal dunia.¹³

Dari rukun khulu' yang dibuat para ulama yaitu tentang seseorang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan orang yang ahli dalam menasarufkan harta, yaitu berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi anak-anak, gila, *safih*. Menurut penulis orang *safih* jelas beda dengan anak-anak dan gila ketika menikah, dari pendapat imam Syafi'i yang memberlakukan *mahjur* sebab *safih* pada anak yatim tatkala belum *balig* dan *rasyid* dilarang menggunakan harta¹⁴, dilihat dari perundang-undangan Islam di Indonesia yaitu dalam KHI pada pasal 98 ayat 1 yang telah memberi batasan bagi seseorang yang dianggap cakap hukum ketika telah berusia 21 tahun atau seseorang yang pernah melangsungkan perkawinan.

¹³Zakiah Daradjat *et. al.*, *op. cit.*, Hal.11-12

¹⁴Abi Bakar Ahmad, *Ma'rifatu as-Sunan wal Asar*, *op. cit.*, 464-465

Mengenai permasalahan *safihah* Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 5-6

Artinya : “Dan janganlah kamu memberikan kepada orang-orang safih (orang yang membelanjakan harta bukan pada tempatnya, atau belum sempurna akal) harta-hartamu yang Allah telah menjadikannya penegak urusan hidupmu. Dan berilah rezeki kepada mereka pada harta itu dan berilah pakaian kepada mereka dan katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik yang mengedepankan perasaan (5), dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta mereka secara boros dan secara cepat-cepat, sebelum mereka dewasa. Dan barang siapa cukup mampu (di antara kamu), maka hendaklah dia memelihara diri dari memakan harta anak yatim. Dan barang siapa tidak cukup mampu (di antara kamu), maka hendaklah dia makan menurut ma'ruf. Maka apabila kamu berikan kepada mereka harta-hartanya, hendaklah kamu adakan saksi untuk itu, Dan cukuplah Allah itu menjadi pengawas terhadap dirimu (6)“.

Prof.. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy memberi tafsir, bahwa Allah menyuruh kita mencoba memberikan lebih dahulu sedikit harta kepada mereka untuk menguji apakah mereka sudah bisa mengendalikannya, jika sudah dapat dan baik perlakuannya, tahulah kita bahwa ia sudah *rasyid*, yaitu sudah dapat *bertasaruf* dengan baik yang menjadi *natijah* bagi baiknya fikiran, dikehendaki dengan ”sampai kepada umur yang umur itu manusia bersedia untuk beristri, yaitu timbul kemauan untuk menjadi suami, ayah dan pemimpin keluarga, dan hal itu tidak sempurna melainkan dengan harta, ringkasnya ayat ini bermakna : cobalah anak-anak yatim itu, sehingga sampai kepada batas mereka sampai umur, jika kamu mendapati sesudah mereka sampai umur bahwa mereka telah *rasyid*, berilah kepada mereka harta-harta mereka. Abu Hanifah berpendapat, bahwa harta-harta

anak yatim diberikan sesudah mereka sampai umur 25 tahun, walaupun tidak *rasyid*.¹⁵

Prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan, dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya haram, kebebasan menggunakan hak selain dibatasi dengan "tidak bertentangan dengan syari'at Islam "juga dibatasi sepanjang" tidak melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain". Prinsip perlindungan hak dalam Islam, sebagaimana telah disinggung di muka, berlaku pada dan untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum, jika dalam menggunakan haknya seseorang bebas melanggar hak orang lain atau hak masyarakat umum, maka sungguh telah terjadi pemahaman yang keliru terhadap prinsip perlindungan dan kebebasan hak, yakni pemahaman kebebasan dan perlindungan hak secara tidak seimbang.

Seorang istri biarpun ia masih melekat pada dirinya sifat *kesafihannya*, dengan hidup berumahtangga lama kelamaan akan bertambah daya fikir dan kecakapannya, jadi dalam hal penggunaan harta dia berhak untuk menasarufkan hartanya, terlebih bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka alternatif terakhir yaitu melalui *khulu'*, di Indonesia telah diatur tentang prosedur pengajuan *khulu'* bagi warga negara muslim yaitu dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 dan UU. No.9 Tahun 1974.

¹⁵M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjied "an-Nur"*, Juz. IV, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 187-188

Jadi istri biarpun pada dirinya masih ada sifat *safihan* diperbolehkan untuk menggunakan hartanya sebagai *'iwad* tatkala terjadi *khulu'*, karena kalau jalan terakhir *khulu'* tidak segera diambil akan dikhawatirkan terjadi kemudaratan yang nantinya akan merugikan pihak istri, berdasarkan kaidah :

Artinya : "Kemadaratan itu harus dihilangkan".

dengan dasar pengambilan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah ayat 195

16

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan"

2. Khulu' safihah jatuh talaq raj'i

Konsep *khulu' safihah* yang menurut imam Syafi'i datangnya bisa dari pihak istri dan juga bisa datangnya dari pihak suami, dari pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* dengan harta dan jatuh *talaq raj'i*, dengan alasan bahwa istri *mahjur 'alaiha* harus ditaruh dibawah perwalian sebab *safih*, dalam kitab *as-Sunan wal al-Asar* beliau berpendapat

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya.

17

Artinya : "Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hajar ditetapkan atas anak yaitm hingga berkumpul dua karakter yaitu balig dan rasyid".

Dari alasan imam Syafi'i yang dapat penulis pahami tentang *talaq raj'i* terhadap *khulu'* suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safih*, nampaknya konsep *khulu'* terhadap istri yang *safihah* tidak sesuai dengan pengertian *khulu'* itu sendiri, meskipun *khulu'* macam dari *talaq*, *khulu'* sendiri bila terjadi maka jatuh *talaq bain*, menurut Inpres No.1 Tahun 1991 pasal 161 menyebutkan

¹⁶Imam Musbikin, *op. cit*, hlm. 67

¹⁷Abi Bakar Ahmad, *op. cit.*, hlm. 457

”Perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat *diruju’*”. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan suatu produk hukum hasil dari para pendapat imam mazhab yang telah dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar ini maka bila terjadi gugatan cerai maka tidak ada hak *ruju’* bagi bekas suami meskipun kondisi *safihah* ataupun tidak, sebab berdasar kaidah :

18

Artinya : ”Kebijaksanaan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Juga berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 59

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul (Nabi saw) dan orang-orang yang memegang perkara (pemimpin) di antara kalian”.

B. Analisis Istinbat Hukum Imam Syafi’i

Dasar *istinbat* hukum yang imam Syafi’i gunakan mengenai permasalahan *hajar*, beliau mengambil dasar dari Q.S. al-Baqarah ayat 282

Artinya : “Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhaninya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.

Juga berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 6

19

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan komentar tentang ayat tersebut sebagai berikut :

¹⁸Imam Musbikin, *op. cit.*, hlm. 124

¹⁹Abi Abdillah Muhammad, *op. cit.*, hlm. 464

Kepada para wali diperintahkan : ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni pandai memelihara harta serta kestabilan mental maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada alasan untuk menahan harta mereka. Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberikan yang diuji sedikit harta sebagai modal, jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, maka dia dinilai telah lulus dan wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian itu dilaksanakan sebelum yang bersangkutan itu dewasa, ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa ujian, yakni diamati pengamalan agamanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis hartanya diserahkan kepadanya kecuali setelah terbukti kemampuannya mengelola harta. Ini berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Imam Abu Hanifah menolak pendapat itu. Menurutnya, apa dan bagaimanapun keadaan anak yatim, bila dia telah mencapai usia 25 tahun, maka wali harus menyerahkan harta itu kepadanya, walaupun dia fasik atau boros. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. 7 tahun setelah dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia. Makna dasar kata () *rusyd* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal

dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursyid* adalah pemberian petunjuk/bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* yang oleh imam Gazali diartikan sebagai dia yang mengalir penangan dan usahanya ketujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran dan bimbingan dari siapapun.²⁰

Wanita yang *safih* sebenarnya akalunya sehat dan sempurna, sebab ia termasuk *mukallaf* dan dapat melakukan perbutan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya. Jika seseorang telah memasuki periode balig dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak-sempurnaan akalunya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah balig, tetapi tidak berakal, seperti orang gila, atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalunya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalunya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*. Sebagaimana sabda Nabi saw.

Artinya : "Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan hukum) dari tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai dengan ia berakal (sembuh)".

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati Ciputat Tangerang, Cet. IV, 2005, hlm. 350-351

Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang untuk umat Islam yaitu UU. No.1 tahun 1974 pada ayat 1 yang menyebutkan ” Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua , berada di bawah kekuasaan wali ”, dalam perwalian ini juga terdapat pada Inpres No. 1 Tahun 1991 pada pasal 107 ayat 1 menyebutkan : ” Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 12 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ”.

Dari tinjauan UU. No. 1 tahun 1974 dan Inpres No.1 tahun 1991 dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang *safihah* tidak ditaruh di bawah perwalian di karenakan ia telah melakukan perbuatan hukum yaitu berupa perkawinan dan seorang *safihah* yang telah kawin berarti ia telah cakap hukum dan berhak mengurus dirinya sendiri, berdasar kaidah usul fiqih

Artinya : “Akad yang ketika sebagai awal dikuatkan (dikukuhkan), tatkala ia akhir tidak dikuatkan”.

Kaidah ini menerangkan bagi wanita ketika hendak menikah diharuskan adanya wali, tetapi apabila akan *fasakh*, tidak harus ada wali di karenakan ia cakap hukum.²¹

Juga berdasarkan kaidah :

*Artinya : “Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan)”.*²²

kaidah ini maksudnya adalah bahwa bagi orang yang merdeka itu kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki. Lain lagi bagi budak ia berada di bawah kekuasaan majikannya.

²¹Imam Musbikin, *op. cit.*, hlm.101

²²*ibid.*, hlm. 129

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN ULAMA LAIN TENTANG KHULU' SUAMI MEMILIKI HAK RUJU' TERHADAP ISTRI SAFIHAH

A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Ulama

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah *balig* dan berakal, mereka juga sepakat bahwa istri yang *safihah* tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin walinya. Dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*nya manakala diizinkan oleh walinya. Seluruh mazhab, kecuali Hambali, sepakat bahwa *balig* dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan *khulu'*.²³

Dalam hal ini *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang *mahjur 'alaiha* imam Syafi'i berpendapat

24

Artinya : “Apabila seorang suami mengkhulu' istri yang mahjur 'alaiha (terhalang menggunakan harta), padahal harta tersebut tidak batal, baginya (suami) berhak ruju', meskipun talaq yang dikehendaki adalah bain, seperti halnya meskipun talaq yang dilakukan adalah bain, maka talaq tersebut bukanlah talaq bain dan baginya ruju'”.

Pendapat serupa yang mensahkan *khulu' safihah* disampaikan para ulama fiqih mazhab Syafi'iyah di antaranya Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahhab* berpendapat

25

Artinya : “Apabila melakukan khulu' mahjurah sebab kesafihannya maka terjadi padanya talaq raj'i, dan batal harta yang disebutkan, meskipun wali memberi izin, karena sesungguhnya dia (mahjurah) tidaklah dari ahli menasarufkan harta dan wali tidak boleh menasarufkan hartanya pada sepadan itu, apabila hal itu sesudah dukhul apabila tidak maka jatuh

²³Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Afif Muhammad, Basrie Press : Jakarta, Cet. I, 1994, hlm. 186-188

²⁴Imam Syafi'i, *op. cit.*, hlm.53

²⁵Abi Yahya Zakariya al-Ansari, *op. cit.*, hlm.67

talaq bain dengan tanpa harta, Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, apabila maka tidak diterima tidak jatuh talaq seperti apa yang mereka pahami dari apa yang disebutkan”.

Ibnu Ibrahim al-Bajuri berpendapat

26

Artinya : “Dan khulu’ mahjurah safihah itu jatuh talaq raj’i dan sia-sia harta yang disebut, walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya dia tidak termasuk dari ahli wajib atasnya harta dan tidak boleh bagi walinya menasarufkan hartanya pada hal serupa itu, selama tiada kekhawatiran atas hartanya dari suami dan tidak dapat menyerahkannya, kecuali hal demikian”.

Abi Ishaq Ibrahim berpendapat

27

Artinya : “Dan tidak boleh bagi safihah melakukan khulu’ dengan sesuatu dari hartanya karena sesungguhnya dia tidak tergolong dari ahli menasarufkan di dalam harta, maka jika suami menjatuhkan talaq padanya dengan sesuatu dari hartanya, maka dia tidak berhak menerima darinya sesuatu seperti apa yang dia tidak berhak meminta harga sesuatu yang dijual kepadanya, jika terjadi khulu’ setelah dukhul maka bagi suami meruju’nya seperti apa yang telah kita sebutkan”.

Pendapat imam Syafi’i juga didukung oleh ulama Syafi’iyyah dalam

Kitabul Fiqih ‘ala Mazahibul Arba’ah

28

Artinya : “Jika keadaan penebus itu mahjur ‘alaih sebab safih maka sesungguhnya tidak berkewajiban menyerahkan harta atasnya untuk ‘iwad khulu’, walaupun dengan izin walinya, jikalau wali memberi izin pada seorang istri yang mahjur ‘alaiha sebab kesafihannya, hal ini seorang istri bila mengkhulu’ suaminya dengan harta maka tindakannya tidak wajib harta atasnya, karena sesungguhnya dia tidak tergolong ahli yang berkewajiban (dalam harta), dan tidak boleh bagi walinya memberikan hartanya pada sesuatu yang menyerupai ‘iwad khulu’, kecuali jika dikhawatirkan hartanya lenyap dengan lantaran suami, maka diizinkan khulu’ dengan menggunakan harta untuk melindungi hartanya, maka sesungguhnya sah dalam hal ini”.

Ulama Hanafiyah berpendapat:

²⁶Ibnu Ibrahim al-Bajuri, *op.cit.*, Juz.III, hlm. 140

²⁷Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf, *al-Muhazab fi Fiqhi al-Imam as-Syafi’i*, Juz. II, Daarul Kutub al-‘Alamiyah : Beirut, Lebanon : hlm. 490

²⁸Abdur Rahman al-Juzairi, *op.cit.*, hlm. 357

Artinya : *"Adapun wanita yang safihah ialah wanita yang sampai menghamburkan, merusakkan melenyapkan hartanya menyia-nyiakan tidak dalam ketentuan syar'i, jikalau safihah mengkhulu' suaminya atas harta jatuhlah talaq dan tidak wajib atasnya harta. Kemudian bila menggunakan lafal khulu' dan sepadannya dari lafal sindiran khulu' maka terjadi bain dan bila dengan lafal talaq maka jatuh raji'"*.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat :

30

Artinya : *"Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak sah pada wanita yang safihah dan tidak sah pada budak wanita melakukan khulu' pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang cenderung dengan sifat ini, bila khulu' wanita yang bodoh (safihah) terhadap suami dengan harta dan suami menerima, maka tidak sah khulu' dan wajib pada suami menolak pemberian harta yang diterimanya, kecuali jika diizinkan wali atau majikan dalam melakukan khulu', maka sesungguhnya khulu'-nya sah dan wajib memberikan tebusan, adapun wanita safihah tidak ada wali baginya"*.

Dari ulama lain berlainan pendapat dengan imam Syafi'i dalam hal keabsahan khulu' safihah, di antaranya yaitu ulama Hanabilah yang berpendapat :

31

Artinya : *"Disyaratkan 'iwad bagi orang yang mampu menggunakan hartanya, maka tidak sah khulu' dengan 'iwad dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita sebab safihah, walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta khulu' merupakan harta yang didermakan (tabaru') dan tidak diizinkan oleh walinya dalam mendermakannya, dan ini merupakan pendapat beliau yang masyhur."*

Abi Muhammad Abdillah bin Qudamah berpendapat

32

Artinya : *"(Jika khulu' wanita mahjur 'alaiha mengkhulu' maka hukumnya tidak sah khulu', dan menjadi talaq raj'i, adapun kalau penanggungan itu karena pailit maka sah khulu'-nya dan wanita tersebut memberikan 'iwad). Karena sesungguhnya wanita tersebut mempunyai tanggungan yang mana ia boleh bertransaksi di dalamnya, maka jika dia telah mampu maka 'iwadnya harus dia bayar, dan orang yang menghutangi tidak berhak menagihnya selama dia masih menjadi tanggungan walinya, sebagaimana dia hutang pada seseorang atau menjual sesuatu yang menjadi tanggungan wanita tersebut, sedangkan dia menjadi tanggungan walinya karena safih masih kecil, atau karena gila, maka tidak boleh menyerahkan 'iwad dari wanita tersebut,"*

²⁹ *ibid*, hlm. 353

³⁰ *ibid*, hlm. 355

³¹ *ibid*, hlm. 358

³² Abi Muhammad Abdillah bin Qudamah, *al-Mugni*, Lebanon : Daar al-Kutub, Juz. 8, hlm.

karena penyerahan 'iwad tersebut sebagai bentuk transaksi dengan harta, padahal wanita tersebut tidak berhak melakukan transaksi, baik itu telah mendapat izin dari wali ataupun tidak, karena wali itu tidak berhak memberikan izin kepada hal-hal yang bersifat tabarru' (sukarela), pada kasus ini disamakan dengan tabarru', hal ini berbeda dengan budak (wanita), karena dia mempunyai hak untuk bertransaksi, dia juga berhak memberikan hibah dengan izin tuannya, berbeda juga dengan budak (wanita) pailit karena dia juga termasuk yang berhak melakukan transaksi, jika wanita safihah mengajukan khulu' dengan kata-kata yang mengarah kepada talaq maka terjadi talaq raj'i dan suami tidak berhak mendapatkan 'iwad dan jika kalimat itu tidak mengarah kepada talaq maka hal itu menjadi khulu' tanpa 'iwad, ada kemungkinan bahwa tidak terjadi karena suami itu rela dengan talaq yang memakai 'iwad, dan itu tidak terlaksana dan tidak mungkin ruju' dengan menyerahkan 'iwad tersebut“.

Dari pendapat imam Syafi'i mengenai *khulu' safihah* nampaknya perlu dianalisis lebih mendalam, di antaranya :

1. Keabsahan khulu' terhadap wanita safihah

Terhadap pendapat imam Syafi'i yang mensahkan *khulu'* yang dilakukan suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safihah* dengan harta, harta tidak batal. Penulis sependapat, konsep *khulu'* menurut imam Syafi'i bahwa *khulu'* datangnya bisa dari permintaan istri kepada suaminya, seperti ucapan istri kepada suaminya ” *khulu'* lah aku dengan seribu, adapun bagimu seribu.³³ Dari pendapat imam Syafi'i *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safih* dengan harta, harta tidak batal, menurut penulis seorang wanita bila telah menikah berarti dia telah melakukan perbuatan hukum dan dia mempunyai kewenangan untuk menggunakan haknya ketika terjadi ketidakharmonisan terhadap suami, yang mana bila dia tetap dalam ikatan pernikahan dengan suami dalam kondisi tersebut dikhawatirkan akan terjadi mudarat pada dirinya, berdasarkan qaidah :

³³Imam Syafi'I, *al-Umm*, hlm. 57

Artinya : " kemadaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin "

istri *safihah* berbeda dengan anak kecil dan orang gila, sebab dia sudah *mukallaf*, dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 menetapkan seseorang yang tidak cakap hukum harus ditaruh dibawah *curratel* kecuali jika telah menikah, jadi bila seorang wanita apabila sudah menikah dianggap sebagai orang yang cakap hukum dan sah bila meminta *khulu'* kepada suaminya, meskipun nantinya yang menjatuhkan *khulu'* suaminya.

Seorang wanita apabila telah menikah ia dianggap mempunyai *ahliyyah* untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan pengertian *ahliyyah*, para ulama membagi *ahliyyah* ini menjadi beberapa macam, dan macam *ahliyyah* itu tidak sekaligus semua terdapat pada diri seseorang, melainkan adanya secara bertahap sesuai dengan perkembangan jasmani dan akalnya sebagaimana yang dilalui dalam perodesasi hidupnya, jadi manusia dalam perjalanan hidupnya dari periode ke periode, semakin sempurna dalam memiliki atau mendukung macam *ahliyyah*. Adapun *ahliyyah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. *Ahliyyatul wujub* atau kecakapan berhak, yaitu kecakapan seseorang untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya dan untuk mendukung hak-hak yang dibebankan kepadanya, yakni untuk menunaikan kewajiban terpenuhi hak-hak orang lain atas dirinya, selanjutnya *ahliyyatul wujub* dibedakan lagi menjadi 2 macam yaitu :

- c. *Ahliyyatul wujub naaqisah* atau kecakapan berhak secara tak sempurna, yaitu kecakapan seseorang hanya untuk mendukung hak-hak yang

³⁴Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I, hlm.

diperuntukkan bagi dirinya, seperti hak untuk mendapatkan warisan, hak nafkah dari suami

- d. *Ahliyyatul wujubil kaamilah* yaitu kecakapan berhak secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang di samping untuk mendukung hak-hak yang diperuntukkan bagi dirinya, juga untuk menunaikan kewajiban. dasar bagi adanya *ahliyyatul wujub* pada diri seseorang adalah sifat kemanusiaannya.

2. *Ahliyyatul ada'* atau kecakapan bertindak, adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang syah menurut *syara'*, contoh melakukan puasa, haji, solat.

Dan hal-hal yang menjadi penghalang kecakapan atau '*awaaridul ahliyyah* (penghalang-penghalang kecakapan) bagi seseorang terjadi karena datang dari diri manusia sendiri atau '*awaaridul muktasabah* seperti *safih*, mabuk. Dan datang bukan dari diri manusia seperti : gila, rusak akal, tidur, pingsan, lupa, sakit, haid dan nifas, meninggal dunia.³⁵

Dari rukun khulu' yang dibuat para ulama yaitu tentang seseorang yang wajib atasnya tebusan disyaratkan orang yang ahli dalam menasarufkan harta, yaitu berakal, *mukallaf*, *rasyid*. Tidak sah bagi anak-anak, gila, *safih*. Menurut penulis orang *safih* jelas beda dengan anak-anak dan gila ketika menikah, dari pendapat imam Syafi'i yang memberlakukan *mahjur* sebab *safih* pada anak yatim tatkala belum *balig* dan *rasyid* dilarang menggunakan harta³⁶, dilihat dari perundang-undangan Islam di Indonesia yaitu dalam KHI pada pasal 98 ayat 1 yang telah memberi batasan bagi seseorang yang dianggap cakap hukum ketika telah berusia 21 tahun atau seseorang yang pernah melangsungkan perkawinan.

³⁵Zakiah Daradjat *et. al.*, *op. cit.*, Hal.11-12

³⁶Abi Bakar Ahmad, *Ma'rifatu as-Sunan wal Asar*, *op. cit.*, 464-465

Mengenai permasalahan *safihah* Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 5-6

Artinya : “Dan janganlah kamu memberikan kepada orang-orang safih (orang yang membelanjakan harta bukan pada tempatnya, atau belum sempurna akal) harta-hartamu yang Allah telah menjadikannya penegak urusan hidupmu. Dan berilah rezeki kepada mereka pada harta itu dan berilah pakaian kepada mereka dan katakanlah kepada mereka itu perkataan yang baik yang mengedepankan perasaan (5), dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta mereka secara boros dan secara cepat-cepat, sebelum mereka dewasa. Dan barang siapa cukup mampu (di antara kamu), maka hendaklah dia memelihara diri dari memakan harta anak yatim. Dan barang siapa tidak cukup mampu (di antara kamu), maka hendaklah dia makan menurut ma'ruf. Maka apabila kamu berikan kepada mereka harta-hartanya, hendaklah kamu adakan saksi untuk itu, Dan cukuplah Allah itu menjadi pengawas terhadap dirimu (6)“.

Prof.. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy memberi tafsir, bahwa Allah menyuruh kita mencoba memberikan lebih dahulu sedikit harta kepada mereka untuk menguji apakah mereka sudah bisa mengendalikannya, jika sudah dapat dan baik perlakuannya, tahulah kita bahwa ia sudah *rasyid*, yaitu sudah dapat *bertasaruf* dengan baik yang menjadi *natijah* bagi baiknya pikiran, dikehendaki dengan ”sampai kepada umur yang umur itu manusia bersedia untuk beristri, yaitu timbul kemauan untuk menjadi suami, ayah dan pemimpin keluarga, dan hal itu tidak sempurna melainkan dengan harta, ringkasnya ayat ini bermakna : cobalah anak-anak yatim itu, sehingga sampai kepada batas mereka sampai umur, jika kamu mendapati sesudah mereka sampai umur bahwa mereka telah *rasyid*, berilah kepada mereka harta-harta mereka. Abu Hanifah berpendapat, bahwa harta-harta

anak yatim diberikan sesudah mereka sampai umur 25 tahun, walaupun tidak *rasyid*.³⁷

Prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya (*iradah*) sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan, dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya haram, kebebasan menggunakan hak selain dibatasi dengan "tidak bertentangan dengan syari'at Islam "juga dibatasi sepanjang" tidak melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain". Prinsip perlindungan hak dalam Islam, sebagaimana telah disinggung di muka, berlaku pada dan untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum, jika dalam menggunakan haknya seseorang bebas melanggar hak orang lain atau hak masyarakat umum, maka sungguh telah terjadi pemahaman yang keliru terhadap prinsip perlindungan dan kebebasan hak, yakni pemahaman kebebasan dan perlindungan hak secara tidak seimbang.

Seorang istri biarpun ia masih melekat pada dirinya sifat *kesafihannya*, dengan hidup berumahtangga lama kelamaan akan bertambah daya fikir dan kecakapannya, jadi dalam hal penggunaan harta dia berhak untuk menasarufkan hartanya, terlebih bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka alternatif terakhir yaitu melalui *khulu'*, di Indonesia telah diatur tentang prosedur pengajuan *khulu'* bagi warga negara muslim yaitu dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 dan UU. No.9 Tahun 1974.

³⁷M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjied "an-Nur"*, Juz. IV, Jakarta : Bulan Bintang, hlm. 187-188

Jadi istri biarpun pada dirinya masih ada sifat *safihan* diperbolehkan untuk menggunakan hartanya sebagai *'iwad* tatkala terjadi *khulu'* , karena kalau jalan terakhir *khulu'* tidak segera diambil akan dikhawatirkan terjadi kemudaratan yang nantinya akan merugikan pihak istri, berdasarkan kaidah :

Artinya : "Kemadaratan itu harus dihilangkan".

dengan dasar pengambilan firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah ayat 195

38

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan"

2. Khulu' safihah jatuh talaq raj'i

Konsep *khulu' safihah* yang menurut imam Syafi'i datangnya bisa dari pihak istri dan juga bisa datangnya dari pihak suami, dari pendapat imam Syafi'i tentang *khulu'* suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* dengan harta dan jatuh *talaq raj'i*, dengan alasan bahwa istri *mahjur 'alaiha* harus ditaruh dibawah perwalian sebab *safih*, dalam kitab *as-Sunan wal al-Asar* beliau berpendapat

Artinya : "Dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya.

39

Artinya : "Ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hajar ditetapkan atas anak yaitm hingga berkumpul dua karakter yaitu balig dan rasyid".

Dari alasan imam Syafi'i yang dapat penulis pahami tentang *talaq raj'i* terhadap *khulu'* suami kepada istri yang *mahjur 'alaiha* sebab *safih*, nampaknya konsep *khulu'* terhadap istri yang *safihah* tidak sesuai dengan pengertian *khulu'* itu sendiri, meskipun *khulu'* macam dari *talaq*, *khulu'* sendiri bila terjadi maka jatuh *talaq bain*, menurut Inpres No.1 Tahun 1991 pasal 161 menyebutkan

³⁸Imam Musbikin, *op. cit*, hlm. 67

³⁹Abi Bakar Ahmad, *op. cit.*, hlm. 457

”Perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah *talaq* dan tidak dapat diruju”⁴⁰. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan suatu produk hukum hasil dari para pendapat imam mazhab yang telah dijadikan rujukan bagi umat Islam di Indonesia, dengan dasar ini maka bila terjadi gugatan cerai maka tidak ada hak *ruju’* bagi bekas suami meskipun kondisi *safihah* ataupun tidak, sebab berdasar kaidah :

40

Artinya : ”Kebijaksanaan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya dihubungkan dengan kemaslahatan”.

Juga berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 59

Artinya : ”Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul (Nabi saw) dan orang-orang yang memegang perkara (pemimpin) di antara kalian”.

B. Analisis Istinbat Hukum Imam Syafi’i

Dasar *istinbat* hukum yang imam Syafi’i gunakan mengenai permasalahan *hajar*, beliau mengambil dasar dari Q.S. al-Baqarah ayat 282

Artinya : “Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, tuhaninya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun darinya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.

Juga berdasarkan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 6

41

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim hingga mereka telah pada umur yang menyiapkan mereka untuk kawin. Kemudian jika kamu mendapati mereka kecakapan mempergunakan harta, maka kembalikanlah kepada mereka harta-hartanya.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya memberikan komentar tentang ayat tersebut sebagai berikut :

⁴⁰Imam Musbikin, *op. cit.*, hlm. 124

⁴¹Abi Abdillah Muhammad, *op. cit.*, hlm. 464

Kepada para wali diperintahkan : ujilah anak yatim itu dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihlah mereka sampai hampir mencapai umur yang menjadikan mereka mampu memasuki gerbang pernikahan. Maka ketika itu, jika kamu telah mengetahui, yakni pengetahuan yang menjadikan kamu tenang karena adanya pada mereka kecerdasan, yakni pandai memelihara harta serta kestabilan mental maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka, karena ketika itu tidak ada alasan untuk menahan harta mereka. Ulama sepakat bahwa ujian yang dimaksud adalah dalam soal pengelolaan harta, misalnya dengan memberikan yang diuji sedikit harta sebagai modal, jika dia berhasil memelihara dan mengembangkannya, maka dia dinilai telah lulus dan wali berkewajiban menyerahkan harta miliknya itu kepadanya. Ujian itu dilaksanakan sebelum yang bersangkutan itu dewasa, ada juga yang berpendapat sesudahnya. Sebagian ulama menambahkan bahwa ujian, yakni diamati pengamalan agamanya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis hartanya diserahkan kepadanya kecuali setelah terbukti kemampuannya mengelola harta. Ini berdasarkan ayat ini dan ayat sebelumnya. Imam Abu Hanifah menolak pendapat itu. Menurutny, apa dan bagaimanapun keadaan anak yatim, bila dia telah mencapai usia 25 tahun, maka wali harus menyerahkan harta itu kepadanya, walaupun dia fasik atau boros. Pendapatnya didasarkan pada pertimbangan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun. 7 tahun setelah dewasa yang menggenapkan usia menjadi 25 tahun adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan dalam diri manusia. Makna dasar kata () *rusyd* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal

dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursyid* adalah pemberian petunjuk/bimbingan yang tepat. Orang yang telah menyandang sifat itu secara sempurna dinamai *rasyid* yang oleh imam Gazali diartikan sebagai dia yang mengalir penangan dan usahanya ketujuan yang tepat, tanpa petunjuk pembenaran dan bimbingan dari siapapun.⁴²

Wanita yang *safih* sebenarnya akalunya sehat dan sempurna, sebab ia termasuk *mukallaf* dan dapat melakukan perbutan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya. Jika seseorang telah memasuki periode balig dan dari dirinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak-sempurnaan akalunya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah balig, tetapi tidak berakal, seperti orang gila, atau belum berakal atau kurang sempurna kemampuan akalunya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalunya, seperti orang yang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*. Sebagaimana sabda Nabi saw.

Artinya : "Diangkat kalam (dibebaskan dari ketentuan hukum) dari tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai dengan ia berakal (sembuh)".

⁴²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati Ciputat Tangerang, Cet. IV, 2005, hlm. 350-351

Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang untuk umat Islam yaitu UU. No.1 tahun 1974 pada ayat 1 yang menyebutkan ” Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua , berada di bawah kekuasaan wali ”, dalam perwalian ini juga terdapat pada Inpres No. 1 Tahun 1991 pada pasal 107 ayat 1 menyebutkan : ” Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 12 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan ”.

Dari tinjauan UU. No. 1 tahun 1974 dan Inpres No.1 tahun 1991 dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang *safihah* tidak ditaruh di bawah perwalian di karenakan ia telah melakukan perbuatan hukum yaitu berupa perkawinan dan seorang *safihah* yang telah kawin berarti ia telah cakap hukum dan berhak mengurus dirinya sendiri, berdasar kaidah usul fiqih

Artinya : “Akad yang ketika sebagai awal dikuatkan (dikukuhkan), tatkala ia akhir tidak dikuatkan”.

Kaidah ini menerangkan bagi wanita ketika hendak menikah diharuskan adanya wali, tetapi apabila akan *fasakh*, tidak harus ada wali di karenakan ia cakap hukum.⁴³

Juga berdasarkan kaidah :

*Artinya : “Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan)”.*⁴⁴

kaidah ini maksudnya adalah bahwa bagi orang yang merdeka itu kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki. Lain lagi bagi budak ia berada di bawah kekuasaan majikannya.

⁸¹Imam Musbikin, *op. cit.*, hlm.101

⁴⁴*ibid.*, hlm. 129

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang pendapat imam Syafi'i tentang suami memiliki hak *ruju'* terhadap *khulu'* istri yang *safihah*, sebagai berikut :

1. Konsep *khulu'* menurut imam Syafi'i mensahkan, *khulu'* datangnya bisa dari pihak suami atau datang dari pihak istri. Dalam hal *khulu'* suami terhadap istri *mahjur 'alaiha* jatuh *talaq raj'i* dengan sebab *safih*, penulis kurang sependapat karena kontradiksi dengan konsep *khulu'*, *khulu'* sendiri merupakan perceraian yang terjadi dan jatuh *talaq raj'i*, dari pendapat imam Syafi'i bahwa harta dari pihak istri tidak batal, kecuali kalau perceraian itu terjadi tanpa harta untuk *'iwad* maka jatuhlah *talaq raj'i*, sebab adanya harta merupakan *'iwad* untuk menghilangkan hak *ruju'* bagi suami biarpun istri dalam kondisi *mahjur* sebab *safih*, *khulu'* sendiri merupakan hak istri yang diperbolehkan oleh Islam ketika sudah tidak dapat hidup bahagia dengan suami walaupun hak menjatuhkan *khulu'* di tangan suami.
2. Metode *istinbat* yang imam Syafi'i gunakan Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan Q.S. an-Nisa ayat 6, beliau menetapkan keadaan kondisi *mahjur* pada *safih* sampai belum *balig* dan *rasyid*, dalam hal *khulu'* seorang istri yang dikhulu' suami dan suami berhak meruju' disebabkan kondisi istri yang *mahjur 'alaiha*. Wanita *safihah* sebenarnya akal nya sehat dan sempurna, sebab ia

termasuk *mukallaf* dan dapat melakukan perbuatan hukum, dengan kemampuan akal yang sempurna seorang istri yang masih melekat pada dirinya sifat *safihah* dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Dalam hal ini *syara'* mengaitkan kemampuan akal yang sempurna bagi seseorang dengan kebaligannya. Jika seseorang telah memasuki periode balig dan darinya tidak menampakkan tanda-tanda ketidak-sempurnaan akalnya, maka orang tersebut dianggap telah dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Sebaliknya, meskipun seseorang itu telah *balig*, tetapi tidak berakal, seperti orang gila, atau belum berakal atau kurang sempurna akalnya seperti anak kecil, atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga orang itu tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang sedang tidur, ia tidak dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum *syara'*. Apalagi wanita tersebut sudah menikah berarti ia telah melakukan tindakan hukum, padahal syarat dari seseorang yang telah melakukan tindakan hukum yaitu kemampuan akalnya, wanita apabila dia sudah menikah secara hukum dia dipandang cakap hukum dan berhak untuk mengurus dirinya sendiri dan keluarganya, imam Syafi'i tidak memberikan batasan sampai kapan perwalian itu berakhir terhadap wanita *safihah*, akankah dia selamanya akan ditaruh di bawah perwalian, padahal kondisi akal seorang istri *safihah* setelah berumah tangga akan semakin peka dan berkembang.

3. Dalam hal ketentuan *khulu'* di Indonesia sudah ada aturannya bagi umat Islam yaitu Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sumber pengambilan hukum mengacu kepada kitab-kitab fiqh, dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam sendiri mendefinisikan yaitu pada pasal 1 yang

menyebutkan “ Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau ‘iwad kepada dan atas persetujuan suami “. Pada pasal ini juga menegaskan yaitu pada pasal 161 yang menyebutkan “ Perceraian dengan jalan khulu’ mengurangi jumlah talaq dan tak dapat diruju’ “. Menurut penulis berdasarkan KHI bahwa khulu’ tergolong *talaq bain sugra*, apabila terjadi maka pihak suami tidak ada hak *ruju’* dan bila ingin kembali kepada istrinya harus melalui akad nikah baru selama dalam masa ‘*iddah*’.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang yang mengarungi kehidupan rumahtangga diantaranya :

1. Hendaklah seorang bila akan memasuki kehidupan bahtera rumahtangga mempersiapkan dirinya, baik persiapan materi ataupun mentalnya, dengan harapan ketika sudah menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri akan lebih bersikap bijaksana ketika menghadapi persoalan rumahtangga yang begitu pelik.
2. Islam menghalalkan perceraian, walaupun masing-masing pihak mempunyai hak untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, hendaklah jalan damai dilakukan, mengingat buah hati dari hasil perkawinan masih butuh kasih sayang orang tuanya.
3. Apabila dari masing-masing pihak akan mengajukan perceraian gunakanlah aturan yang telah dibuat oleh ulil amri, sebab dengan adanya putusan dari ulil amri akan dirasa lebih terjamin *legalitasnya*.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah kepada Allah swt. penulis ucapkan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'alam bis sawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jilid VIII, Bandung : Pustaka Rizki Putra, Cet. 20, 2006
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah*, Daar Al- Kutub Al- 'Alamiyah, Beirut Lebanon
- Rusydi, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid fi Nihayah al-Muqtasid*, Daar Ihya Al-Arabiyy, Indonesia, Juz II
- Daradjat, Zakiah et. al., *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAIN di Jakarta, 1984/1985
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Daar Al-Fikr
- , *Ar-Risalah*
- Ibrahim, Abi Ishaq, *al-Muhazab fi Fiqhi Imami as-Syafi'i*, Beirut Lebanon : Daar al- Kutub al- 'Alamiyah
- Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadis Sahih al-Bukhari*, Pustaka Amani, Jakarta
- As-Syaryani, Muhammad, *Iqna*, Darul Hiya al-Kutub al- 'Arabiyyah, Indonesia, Juz.II
- Zakariya, al-Ansari, *Fathul Wahhab*, Toha Putra, Semarang, Juz.II
- Mugniyyah, Muhammad Jawid, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Muhammad Afif, Basrie Press, Jakarta
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*
- As-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur'an Madjied " an-Nur "*, Juz. IV, Jakarta : Bulan Bintang
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. I, 1973
- Jalil, Imam, *al-Mahali*, Daarul Fikri
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. VIII, 2003
- Al-Munawar, Said Aqil Husin, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat Press : Jakarta, Cet.2, 2002
- Ali Hasan, Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Cet. IV, 2002

- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2001
- Hanun, Mahtuf dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya : Terbit Terang
- Abdil 'Aziz, Zainuddin bin, *Fathul Mu'in*
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University, Cet-9, 2000
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarsin, Edisi III, 1996
- Rahman, Abdur, *KHI di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet. I, 1992
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Cet. 3, 1990
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*, Hida Karya Agung Jakarta, Cet. 8, 1990
- _____, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, Cet. 10, 1983
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : Toha Putra, 1989
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya, Cet. 10, 1983
- F.Z, Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan Islam*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, Cet I, 1976
- Syukur, Amin dkk, *Metode Studi Islam*, Semarang: Gunung Jati, Bekerjasama dengan IAIN Walisongo Press
- Al-Bajuri, Ibrahim, *al-Bajuri 'alaa Ibnu Qasimi al-Gayi*, Juz. I, Menara Kudus, Indonesia
- SA., Romli, *Muqaranah Mazaahib fil Ushul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, Cet.I, 1999
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Toha Putra : Semarang, Cet.I, 1994
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet.9, 2005
- Abdillah, Abi Muhammad, *al-Mugni*, Lebanon, Daar al-Kutub, Juz.8
- Ahmad, Abi Bakar, *Ma'rifatu as-Sunan wal al-Asar*, Daarul Kutub al-'Alamiyyah, Beirut, Lebanon, Jilid. IV

—————, *as-Sunan al-Kubra*, Daarul Kutub al-‘Alamiyyah

Sihab, Muhammad Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati, Ciputat, Tangerang, Cet.IV, 2005

Halim, Abdul, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta : Kencana, Cet. I, 2006

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, IKAPI, Bandung, Cet.III, 1995

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Diklat Kuliah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syaifullah
NIM : 2101029
Tempat / Tgl Lahir : Semarang, 11 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki- laki
Alamat : Jl. Cinde Selatan No.31A RT 09 RW 08,
Semarang
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : M. Shidqon
Nama Ibu : Muzaroah
Jenjang Pendidikan : - SDI Al-Fajar Semarang lulus tahun 1994
- SMP Muhammadiyah 3 Semaranglulus tahun 1997
- SMA Muhammadiyah I Demak lulus tahun 2000
- IAIN Walisongo Semarang masuk tahun 2001